

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN  
NOMOR HK.02.02/D/6313/2025  
TENTANG  
RENCANA AKSI PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL  
KESEHATAN LANJUTAN  
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan tentang Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
5. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 930);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1128);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 778);

9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2015/2024 tentang Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG RENCANA AKSI PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Penetapan Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi program Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan agar pelaksanaannya lebih terarah dan efektif.
- KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

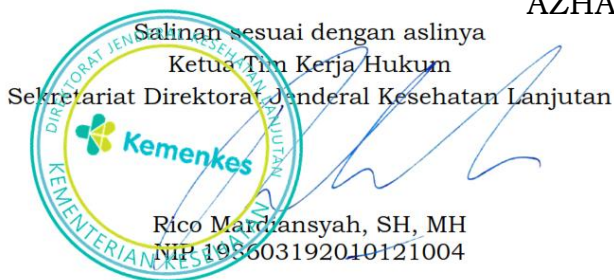
Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Desember 2025

DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN,

ttd.

AZHAR JAYA



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
KESEHATAN LANJUTAN  
KEMENTERIAN KESEHATAN  
NOMOR HK.02.02/D/6313/2025  
TENTANG RENCANA AKSI PROGRAM  
DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN  
LANJUTAN KEMENTERIAN  
KESEHATAN TAHUN 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

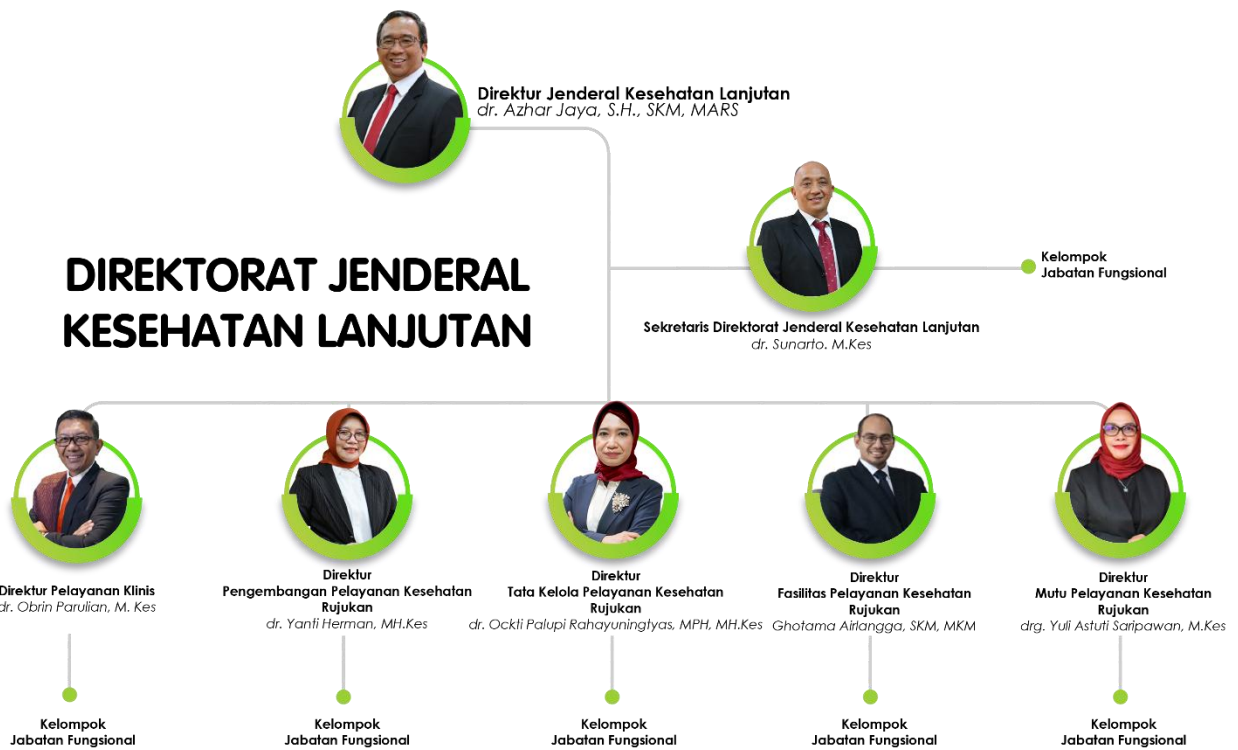
Periode tahun 2025-2029 merupakan tahapan terakhir dari RPJPN 2025-2045, sehingga merupakan periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting dan strategis. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan RPJPN, di mana pendapatan per kapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income countries*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Sesuai dengan RPJPN 2025-2045, sasaran pembangunan jangka menengah 2025-2029 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai bidang yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Selain itu, sejak ditetapkannya Renstra Kementerian Kesehatan pada tahun 2020, telah terjadi disrupsi besar-besaran dalam kehidupan manusia bahkan pada skala global karena adanya pandemi COVID-19. Wabah COVID-19 yang kemudian diperkirakan akan menjadi endemik, memaksa pemerintah di seluruh dunia untuk menyesuaikan kebijakan sekaligus membangun konsep untuk perubahan cara hidup masyarakat. Pada konteks ini ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh Kementerian

Kesehatan yang merupakan lingkup tugas bagi Ditjen Kesehatan Lanjutan antara lain adalah:

1. Kesehatan merupakan isu prioritas dan menekankan pentingnya ketahanan (resiliensi) sistem kesehatan
2. Beragam tantangan dalam peningkatan kualitas layanan primer;
3. Akses ke layanan rujukan yang masih terbatas;
4. Pembiayaan kesehatan yang masih berfokus pada upaya kuratif;
5. Perlunya peningkatan kapasitas dan ketahanan sistem Kesehatan
6. Isu Transformasi Sistem Kesehatan yang mendukung organisasi yang lebih *agile* dan dinamis.

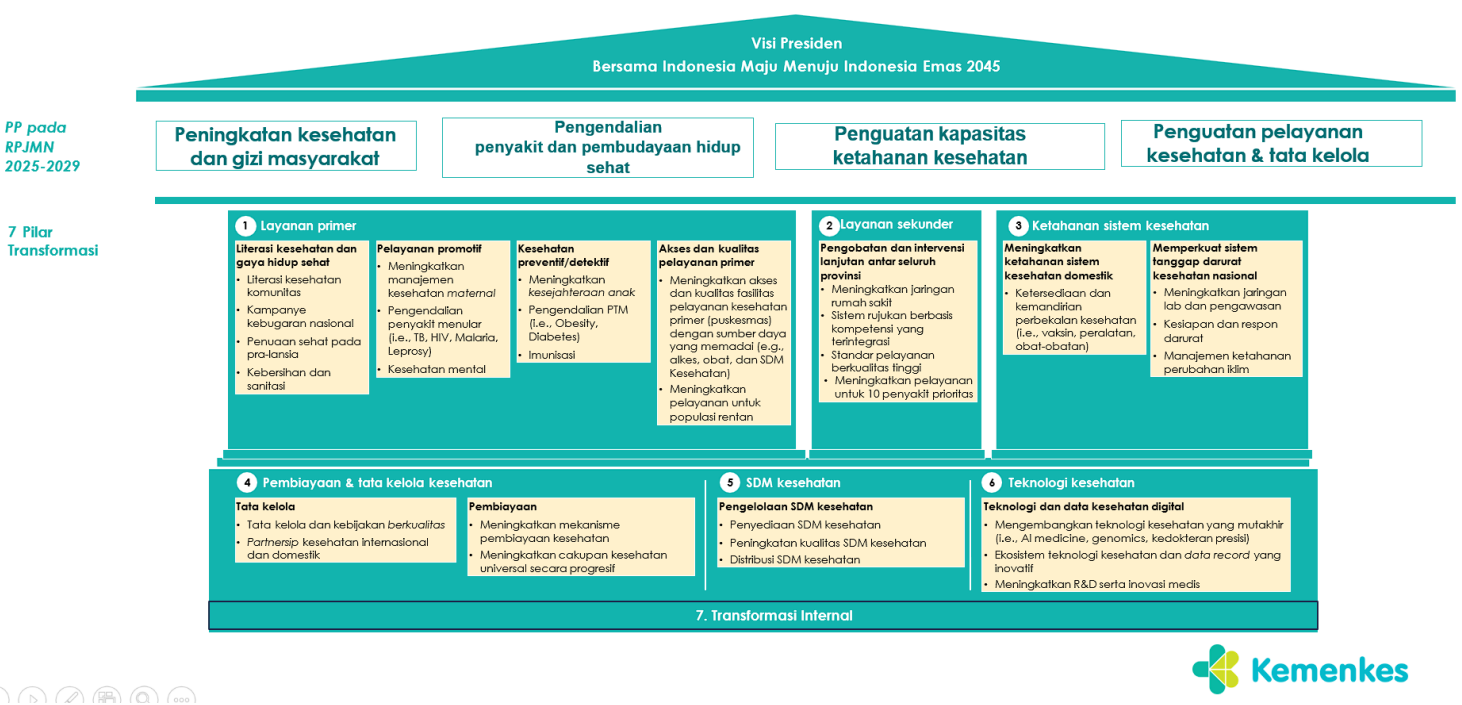
Gambar 1.0 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan



Perubahan Renstra Kementerian Kesehatan harus dilakukan sebagai rumusan operasional atas gagasan dan konsep transformasi tersebut. Substansi perubahan Renstra harus mencerminkan prinsip dan tujuan dari transformasi kesehatan. Renstra Kementerian Kesehatan diharapkan dapat menggambarkan kapasitas dan bentuk respons Kementerian Kesehatan dalam menjawab disrupsi dan tantangan di masa yang akan datang.

Gambar 1.1 Transformasi Kesehatan Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan

## Kemenkes berkomitmen melanjutkan transformasi kesehatan



Perubahan Renstra Kementerian Kesehatan menjadi konsekuensi logis ketika sektor kesehatan akan bertransformasi. Perubahan tersebut mencakup 6 (enam) hal prinsip atau disebut sebagai pilar transformasi (Tambahkan gambar pilar – pilar transformasi) kesehatan yang juga merupakan bentuk penerjemahan reformasi sistem kesehatan nasional, yaitu:

1. Transformasi Layanan Primer, bertujuan untuk mewujudkan masyarakat sehat di setiap siklus hidup melalui peningkatan layanan kesehatan berdasarkan siklus hidup dan peningkatan akses serta kualitas pelayanan primer
2. Transformasi Layanan Rujukan, bertujuan meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan lanjutan secara merata di Indonesia, terutama melalui empat strategi utama: perluasan jejaring rumah sakit,

penguatan sistem rujukan berbasis kompetensi yang terintegrasi, peningkatan standar pelayanan berkualitas tinggi, dan penguatan layanan terhadap 10 penyakit prioritas.

3. Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan dalam menghadapi Kejadian Luar Biasa (KLB)/wabah penyakit/kedaruratan kesehatan masyarakat, melalui kemandirian kefarmasian dan alat kesehatan, penguatan surveilans yang adekuat berbasis komunitas dan laboratorium, serta penguatan sistem penanganan bencana dan kedaruratan kesehatan;
4. Transformasi Pembiayaan Kesehatan, untuk menjamin pembiayaan yang selalu tersedia dan transparan, efektif dan efisien, serta berkeadilan;
5. Transformasi SDM Kesehatan, dalam rangka menjamin ketersediaan dan pemerataan jumlah, jenis, dan kapasitas SDM kesehatan; dan
6. Transformasi Teknologi Kesehatan, yang mencakup: (1) integrasi dan pengembangan sistem data kesehatan, (2) integrasi dan pengembangan sistem aplikasi kesehatan, dan (3) pengembangan ekosistem (teknologi kesehatan (regulasi/kebijakan yang mendukung, memberikan kemudahan/fasilitasi, pendampingan, pembinaan serta pengawasan yang memudahkan atau mendukung bagi proses pengembangan dan pemanfaatan teknologi kesehatan yang berkelanjutan) yang disertai peningkatan tata kelola dan kebijakan kesehatan.

Kondisi akses pelayanan kesehatan rujukan yaitu jumlah RS meningkat 24% sejak tahun 2014 namun demikian masih ada 7 kabupaten/kota yang belum memiliki RS dan lebih dari separuh (50,4% 50,3%) RS berlokasi di Pulau Jawa. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Perumahasakitan menjelaskan bahwa penyediaan Rumah Sakit didasarkan pada perhitungan rasio tempat tidur dan jumlah penduduk. Rasio tempat tidur RS nasional saat ini mencapai 1,4 tempat tidur per 1000 penduduk dan telah memenuhi standar WHO yaitu 1 tempat tidur untuk 1.000 penduduk. Namun demikian masih 13 provinsi yang memiliki rasio TT RS di bawah rasio nasional. Di samping itu, pemenuhan aksesibilitas perlu mempertimbangkan area jangkauan yang luas, dengan kondisi geografis dan lokasi yang terpencil sehingga berkontribusi pada waktu dan jarak tempuh mencapai fasilitas pelayanan Kesehatan.

Pemenuhan akses layanan primer dan rujukan berkualitas merupakan tantangan yang perlu diatasi Kementerian Kesehatan dengan penguatan

sistem kesehatan melalui transformasi kesehatan. Perubahan Renstra Kementerian Kesehatan menjadi konsekuensi logis ketika sektor kesehatan akan bertransformasi. Dokumen Rencana Aksi Ditjen Kesehatan Lanjutan ini menjabarkan perencanaan aksi program menuju transformasi Program Pelayanan Kesehatan Lanjutan sesuai Perubahan Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029.

## B. Potensi dan Permasalahan

### 1. Layanan Kesehatan Lanjutan

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kondisi geografis yang beragam memiliki sebaran penduduk yang luas dan tidak merata. Akses dan mutu pelayanan fasilitas pelayanan kesehatan menjadi salah satu tantangan bagi penduduknya untuk memperoleh layanan kesehatan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menetapkan bahwa setiap orang mempunyai hak mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau agar dapat mewujudkan derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya. Untuk memenuhi hak setiap orang dan menyediakan pelayanan kesehatan secara merata, Pemerintah mengimplementasikan Jaminan Kesehatan Nasional pada tahun 2014 sehingga membuka akses masyarakat ke pelayanan kesehatan seluas-luasnya. Cakupan dan akses pelayanan harus disertai pelayanan yang bermutu agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Rumah Sakit yang telah teregistrasi di Indonesia tahun 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 sebanyak 3.235 rumah sakit yang terdiri dari 2.720 rumah sakit umum, 513 rumah sakit khusus, dan 2 rumah sakit bergerak. Sebanyak 1.206 rumah sakit adalah milik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan TNI/POLRI; kemudian milik BUMN sebanyak 31 rumah sakit serta sebanyak 1.998 rumah sakit milik swasta (milik perorangan, perusahaan, organisasi keagamaan, organisasi sosial, dan swasta/lainnya). Untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit maka diselenggarakan akreditasi rumah sakit. Jumlah rumah sakit yang terakreditasi adalah 3.130 RS (96,7%) dan masih terdapat 105 RS (3,3%) yang belum terakreditasi. Adapun rincian capaian akreditasi rumah sakit sebagai berikut tingkat paripurna 2.631 (84,1%), tingkat utama 384 (12,3%), lulus tingkat madya 113 (3,6%), dan JCI (murni) ada 2 RS.

Peran rumah sakit diarahkan tidak hanya berfokus pada pelayanan kuratif dan rehabilitatif untuk mengejar *revenue*, tetapi harus mempunyai peran dalam program prioritas, seperti penurunan kematian *maternal*, penurunan kematian bayi, penurunan *stunting*, penurunan *wasting*, dan juga pengendalian penyakit.

## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

#### A. Visi Kementerian Kesehatan

Periode tahun 2025-2029 merupakan tahapan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, sehingga menjadi sangat penting dan strategis. RPJMN 2025-2029 akan menjadi penentu keberhasilan dan pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country/MIC*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Cita-cita Indonesia dalam RPJPN 2025-2045, yaitu Indonesia Emas 2045 dijabarkan dalam RPJMN 2025-2029 menjadi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Selaras dengan visi pada RPJMN 2025-2029, Kementerian Kesehatan menetapkan visi 2025-2029, yaitu Masyarakat yang Sehat dan Produktif Guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045.

#### B. Misi Kementerian Kesehatan

Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Kementerian Kesehatan yakni: ” Masyarakat Yang Sehat dan Produktif Untuk Indonesia Emas 2045”, maka telah ditetapkan 6 (enam) Misi Kementerian Kesehatan 2025-2029 yang merupakan penjabaran Misi Presiden Tahun 2025-2029, yakni:

1. Mewujudkan masyarakat sehat pada seluruh siklus hidup
2. Memenuhi layanan kesehatan yang baik, adil, dan terjangkau
3. Mengimplementasikan sistem ketahanan kesehatan yang tangguh dan responsive
4. Memperkuat tata Kelola dan pendanaan kesehatan nasional yang berkecukupan, adil dan berkelanjutan
5. Mengembangkan teknologi kesehatan yang maju
6. Mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif dan efisien

#### C. Tujuan Kementerian Kesehatan

Dalam rangka pencapaian visi, ditetapkan 6 tujuan Kementerian Kesehatan dengan 6 indikator tujuan untuk tahun 2025-2029 yaitu:

1. Masyarakat sehat di setiap siklus hidup;
2. Layanan Kesehatan yang baik, adil dan terjangkau;
3. Sistem Ketahanan Kesehatan yang tangguh dan responsif;

4. Tata Kelola dan Pembiayaan Kesehatan yang efektif, adil, dan berkelanjutan;
5. Teknologi Kesehatan yang maju; dan
6. Kementerian Kesehatan yang agile, efektif, dan efisien.

Selaras dengan tujuan Kementerian Kesehatan serta untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi, maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan Tahun 2025 – 2029 sebagai berikut :

1. Layanan Kesehatan yang Baik, Adil dan Terjangkau
2. Teknologi Kesehatan yang Maju

D. Sasaran Strategis dan Sasaran Program

Dalam rangka mencapai tujuan Kementerian Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan maka ditetapkan Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan Tahun 2025-2029 adalah:

Tujuan/Sasaran Strategis		Indikator Sasaran Strategis	
		<b>Tujuan 3. Layanan Kesehatan yang baik, adil, dan terjangkau</b>	
3.1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan primer, lanjutan dan labkes		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase kab/kota dengan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar</li> <li>2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar</li> <li>3. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan mencapai akreditasi paripurna</li> <li>4. Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan</li> <li>5. Persentase belanja kesehatan <i>out of pocket</i></li> <li>6. Persentase masyarakat memiliki asuransi kesehatan aktif</li> <li>7. Rasio tenaga medis dan tenaga kesehatan terhadap populasi</li> </ol>

Tujuan/Sasaran Strategis		Indikator Sasaran Strategis	
		<b>Tujuan 6. Teknologi Kesehatan yang Maju</b>	
6.1	Meningkatnya kualitas ekosistem teknologi kesehatan dan uji klinis		8. Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional 9. Persentase masyarakat yang terpantau kesehatannya melalui SIKN 10. Pertumbuhan layanan kesehatan berbasis kedokteran presisi yang diimplementasikan 11. Peningkatan kapabilitas uji klinik di Indonesia
		<b>Tujuan 7. Kementerian Kesehatan yang <i>agile</i>, efektif dan efisien</b>	
7.1	Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian Kesehatan		12. Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan

### BAB III

## ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

#### A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan nasional 2025-2029 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang bidang Kesehatan (RPJPK) 2025-2045. Pembangunan Indonesia 2025-2029 ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pembangunan manusia diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja. Kebijakan pembangunan manusia tersebut dilakukan berdasarkan pendekatan siklus hidup, dan inklusif termasuk memperhatikan kebutuhan penduduk usia lanjut maupun penduduk penyandang disabilitas, dan pengelolaan SDM bertalenta.

Kebijakan pembangunan manusia secara umum diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja. Kebijakan ini dilaksanakan dengan berdasarkan pada pendekatan siklus hidup, dan inklusif termasuk memperhatikan kebutuhan penduduk usia lanjut maupun penduduk penyandang disabilitas, dan pengelolaan SDM bertalenta. Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya Umur Harapan Hidup, menurunnya Angka Kematian Bayi, menurunnya Angka Kematian Ibu, menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita.

##### 1. Arah Kebijakan Nasional Pembangunan Kesehatan

Pembangunan kesehatan nasional berada dalam konteks lingkungan dan isu strategis terkait dengan pemenuhan layanan dasar, dengan berbagai isu di dalamnya dari kesehatan ibu dan anak, kesehatan lingkungan, pemenuhan gizi, sistem rujukan pelayanan kesehatan dan

sebagainya. Khusus terkait dengan bidang kesehatan, RPJMN 2025-2029 merumuskan arah kebijakan, yaitu “Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, dengan penekanan pada penguatan sistem pelayanan kesehatan dasar dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi”.

## 2. Strategi Nasional Pembangunan Nasional

Arah kebijakan nasional di atas dicapai melalui strategi kesehatan nasional khusus Ditjen Kesehatan Lanjutan sesuai tugas dan fungsinya mendukung Strategi Kesehatan Nasional di atas, yang berfokus pada transformasi layanan lanjutan semakin meningkatkan akses dan mutu pelayanan secara merata dan berkeadilan melalui pembangunan dan penyediaan layanan spesialisik di berbagai wilayah Indonesia. Upaya ini dilakukan melalui pembangunan 38 rumah sakit baru di luar pulau Jawa, penyediaan sarana dan alat kesehatan, serta penguatan tata kelola rumah sakit. Hingga 2024, 97,1 persen fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan milik pemerintah telah memenuhi standar sarana, prasarana, dan alat kesehatan. Pemerintah juga memperluas layanan rujukan untuk 10 penyakit prioritas, yaitu jantung, kanker, stroke, ginjal, kesehatan ibu dan anak, respirasi dan tuberkulosis, diabetes melitus, gastrohepatologi, penyakit infeksi *emerging* serta kesehatan jiwa, dengan pemerataan layanan seperti bedah jantung terbuka, *cathlab*, terapi kanker, dan *Positron Emission Tomography – Computed Tomography (PET-CT)*. Dari 34 provinsi, hanya 10 provinsi yang sudah memiliki RS dengan kapasitas memberikan pelayanan terhadap 10 penyakit prioritas ini. Program pengampunan rumah sakit dijalankan dengan pemberian dukungan pelatihan, pendampingan pelayanan dan/atau tindakan serta dukungan sarana, prasarana dan alat kesehatan terhadap jejaring layanan prioritas. Peningkatan mutu juga tercermin dari bertambahnya rumah sakit vertikal dengan layanan unggulan internasional dan semakin meningkatnya kepuasan pasien. Hingga tahun 2024, terdapat 28 RS vertikal dengan layanan unggulan internasional, meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan tahun 2022 yang hanya berjumlah 12 RS. Selain itu, tingkat kepuasan pasien rujukan mencapai 98,37 persen, konsisten di atas 90 persen selama dua tahun terakhir. Persentase kematian pasien rawat inap lebih dari 48 jam menurun signifikan dari 2,7 persen pada 2023 menjadi 0,97 persen pada 2024. Pencapaian ini didukung oleh

penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK), serta penguatan layanan emergensi ibu dan anak, seperti operasi sesar emergensi dan pelayanan obstetri neonatal emergensi komprehensif (PONEK). Tidak hanya berfokus pada pelayanan domestik, rumah sakit Indonesia kini juga berperan sebagai penggerak ekonomi melalui wisata medis, dengan 29 rumah sakit telah ditetapkan sebagai destinasi wisata kesehatan yang menawarkan pelayanan tanpa hambatan, dipilih dengan cermat (*curated*), dan disesuaikan dengan kebutuhan (*customized*) bagi pasien domestik maupun mancanegara untuk menggabungkan perawatan kesehatan dengan pengalaman wisata. Untuk mempertahankan momentum ini, peningkatan sarana prasarana, alat kesehatan, serta kualitas layanan harus terus dioptimalkan guna memperkuat posisi Indonesia di kancah kesehatan global sekaligus meningkatkan kontribusi sektor kesehatan terhadap devisa negara. Selain teknologi informasi, sejak tahun 2022, Kementerian Kesehatan memperkuat transformasi teknologi dengan mengembangkan bioteknologi kesehatan untuk mewujudkan *precision medicine* melalui inisiatif *Biomedical Genome-based Science Initiative* (BGSi). Program BGSi ditujukan untuk mendukung upaya deteksi potensi penyakit secara dini dan menghadirkan pengobatan yang presisi bagi masyarakat melalui pemanfaatan teknologi genomik dan omiks lainnya. Melalui program BGSi, Kementerian Kesehatan turut mengembangkan kapasitas nasional dalam memanfaatkan teknologi sekuensing (*targeted* dan *whole genome sequencing*) dan mengembangkan sistem data dan informasi yang memungkinkan analisis kesehatan yang lebih komprehensif dengan memanfaatkan data demografis, klinis, genomik, serta omiks lainnya. Integrasi ini diharapkan akan membuka jalan bagi pendekatan medis yang lebih presisi dan berbasis data, serta memperkuat ekosistem riset dan layanan kesehatan berbasis bioteknologi di Indonesia.

#### B. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan

Arah kebijakan Kementerian Kesehatan hingga 2029 merupakan penjabaran lebih lanjut dari arah kebijakan nasional dengan memperhatikan lingkungan kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan. Arah kebijakan Kementerian Kesehatan menggambarkan perubahan cara dan lingkup kerja kementerian ke depan yang akan memasuki situasi penuh ketidakpastian dan dinamika, baik dalam bidang

kesehatan maupun bidang lainnya yang mempengaruhi kesehatan. Perubahan tersebut dikonsepsikan sebagai Transformasi Kesehatan yang menjadi jiwa dari perubahan Renstra, yaitu dengan rumusan: “Menguatkan sistem kesehatan dengan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan lanjutan menuju cakupan kesehatan semesta, dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan lanjutan yang berkualitas, sistem ketahanan kesehatan yang tangguh, SDM kesehatan yang kompeten, sistem pembiayaan kesehatan yang efektif, serta penyelenggaraan kesehatan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi”.

Arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Rencana Strategi (Renstra) Kementerian Kesehatan 2025-2029 sejalan dengan transformasi kesehatan. Untuk menjamin dan mendukung pelaksanaan berbagai upaya kesehatan yang efektif dan efisien maka arah pengembangan upaya kesehatan, bergerak dari kuratif rehabilitatif menuju ke arah preventif dan promotif. Upaya kesehatan yang dianggap sebagai upaya prioritas dan mempunyai daya ungkit besar di dalam pencapaian hasil pembangunan kesehatan dilakukan secara terintegrasi dalam lokus dan fokus kegiatan dalam ruang lingkup Sistem Kesehatan Nasional.

Transformasi Layanan Lanjutan:

1. Sulitnya akses terhadap layanan rumah sakit rujukan menjadi kendala dalam menangani beban penyakit terutama penyakit katastropik, khususnya di wilayah terpencil. Penyakit katastropik seperti jantung, kanker, stroke, diabetes melitus, dan gangguan ginjal merupakan penyebab kematian tertinggi sekaligus pembiayaan terbesar di Indonesia. Namun, ketersediaan layanan spesialisik masih terbatas, sebagian besar disebabkan oleh belum optimalnya ketersediaan fasilitas, alat kesehatan, serta tenaga medis yang sesuai standar di banyak rumah sakit. Sebagai contoh, pada tahun 2023-2024, lebih dari 50.000 anak dengan penyakit jantung bawaan tidak tertangani karena karena operasi pemasangan ring jantung baru tersedia di 28 provinsi, sedangkan bedah jantung terbuka hanya dapat dilakukan di 22 provinsi. Keterbatasan akses ini diperkuat oleh temuan SKI 2023 yang menunjukkan hanya 37,2 persen rumah tangga yang merasa mudah mengakses rumah sakit

dengan ketimpangan terlihat jelas antara masyarakat perkotaan (53,8 persen) dan pedesaan (2,5 persen). Maka, sebagai bagian dari transformasi layanan lanjutan, pemerintah menargetkan tersedianya layanan untuk empat penyakit katastrofik utama di seluruh 514 kabupaten/kota di Indonesia, serta minimal satu rumah sakit rujukan untuk penyakit katastrofik di setiap kabupaten/kota. Namun, pencapaian target ini masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan, termasuk keterbatasan sumber daya, fasilitas, dan distribusi tenaga medis spesialis.

2. Pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan milik pemerintah yang memenuhi standar sarana, prasarana, dan alat kesehatan (SPA) masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek monitoring dan pemutakhiran data. Pemerintah pusat telah menyalurkan bantuan untuk pemenuhan alat kesehatan terutama untuk penyakit prioritas. Namun, di tahun 2024, dilaporkan hanya 97.12 persen dari target 100 persen fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan milik pemerintah yang memenuhi SPA sesuai standar. Beberapa penyebabnya antara lain belum dilakukannya pembaruan data SPA di sistem ASPAK (Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan) baik karena kurangnya kepatuhan maupun kurangnya SDM untuk mengisi ASPAK, kerusakan pada alat yang sudah ada serta penambahan rumah sakit baru yang belum mengisi data ASPAK. Penurunan nilai kumulatif SPA juga dipengaruhi oleh perubahan kelas rumah sakit (misalnya, naik kelas) yang menyebabkan kebutuhan SPA turut berubah, serta adanya pembaruan data kondisi SPA yang mencerminkan situasi aktual di lapangan. Di sisi lain, rencana pengadaan alat kesehatan tidak berjalan sesuai harapan karena proses pengadaan yang memerlukan waktu lama, terutama yang menggunakan skema lelang internasional.
3. Selain ketersediaan jumlah, kurangnya kapasitas dan kualitas pelayanan lanjutan di rumah sakit merupakan isu utama yang mendasari transformasi layanan lanjutan. Keterbatasan ini menyebabkan antrian panjang dan pelayanan yang belum optimal bagi pasien, khususnya untuk penyakit katastrofik.
4. Perluasan layanan dari RS yang sudah mampu melayani penyakit katastrofik melalui pengampunan berpotensi untuk mendorong perbaikan akses terhadap layanan rujukan. Pemerintah mengembangkan stratifikasi dan jejaring pengampunan pada 10

pelayanan kesehatan penyakit prioritas/katastropik (kanker, kardiovaskular, stroke, uronefrologi, kesehatan ibu dan anak, gastrohepatologi, diabetes melitus, penyakit infeksi emerging, tuberkulosis, dan kesehatan jiwa) guna meningkatkan kompetensi rumah sakit dalam diagnosis dan terapi yang tepat serta menjaga kualitas hidup pasien. Proses pengampuan merupakan proses dimana RS dengan kompetensi yang lebih tinggi (RS pengampu nasional) memberikan dukungan kepada RS jejaring melalui kegiatan seperti pendampingan pelayanan, pelatihan, telekonsultasi, dan *workshop*. Upaya ini diatur pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/174/2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kesehatan Prioritas dengan harapan seluruh RS yang diampu dapat memperoleh setidaknya akreditasi Madya dalam upaya peningkatan akses layanan lanjutan pada tiap kota/kabupaten. Oleh karena itu, komitmen antara jejaring RS pengampuan, pemerintah pusat, daerah, dan dinas kesehatan terkait diperlukan untuk mendukung pelaksanaan dan keberhasilan program tersebut.

5. Sistem rujukan elektronik merupakan peluang nyata untuk memastikan pasien mendapatkan tindakan yang tepat dan tepat waktu, namun implementasinya masih terkendala oleh keterbatasan akses jaringan dan rendahnya adopsi rekam medis elektronik. Pemerintah menyadari penambahan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan tanpa diimbangi peningkatan kualitas sistem rujukan justru dapat merugikan pasien. Aplikasi Sistem Informasi Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) berpotensi mendukung pengambilan keputusan dalam proses rujukan, termasuk mencegah penolakan pasien akibat keterbatasan kapasitas layanan rujukan. Pemanfaatan rekam medis yang lengkap menjadi komponen penting dalam mempercepat proses rujukan karena informasi pasien dapat langsung diakses oleh fasilitas rujukan. Namun, upaya integrasi antara SISRUTE dan sistem informasi lainnya masih menjadi proses yang berjalan.
6. Walaupun terjadi peningkatan angka rujukan kasus, pelaksanaan program rujuk balik untuk penyakit kronis yang sudah stabil ke fasilitas pelayanan kesehatan primer belum berjalan optimal. Kondisi penumpukan yang terjadi dalam layanan rujukan dapat menghambat masuknya pasien rujukan baru untuk mendapatkan pelayanan yang

diperlukan akibat *backlog* yang terjadi. Tidak hanya itu, berdasarkan data dari Ombudsman RI, terdapat hingga 400 pengaduan mengenai diskriminasi yang dialami pasien, terutama yang menggunakan BPJS dalam mengakses layanan kesehatan di tahun 2022. Diskriminasi yang dialami pasien dapat berupa layanan yang lebih lambat, keterbatasan waktu dalam mendapatkan informasi saat menerima pelayanan, atau bahkan penolakan layanan akibat pembatasan “kuota” BPJS, yang terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta. Hambatan program rujuk balik antara lain kurangnya koordinasi antara fasilitas kesehatan, ketersediaan obat di FKTP yang tidak optimal, dan kurangnya pemahaman serta kesadaran dari pasien dan petugas kesehatan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan harus terus diupayakan melalui berbagai cara seperti pelatihan SDM, regulasi mengenai standar pelayanan, maupun bentuk pengawasan dari negara melalui penerimaan pelaporan dari pihak fasilitas pelayanan kesehatan maupun masyarakat langsung.

7. SDM kesehatan menjadi komponen penting dalam meningkatkan kualitas layanan rujukan, namun Indonesia masih kekurangan SDM spesialisik dan subspecialistik. Pada tingkat rujukan, hanya terdapat 51.201 dokter spesialis di rumah sakit dengan proporsi dokter spesialis dasar paling besar (39 persen). Saat ini Indonesia masih dihadapkan dengan permasalahan kekurangan jumlah dokter spesialis selain distribusi yang tidak merata. Untuk memberikan pelayanan Kesehatan spesialisik yang terstandar di Indonesia dengan jumlah penduduk sebesar 280 juta lebih saat ini kekurangan sekitar 25.629 dokter spesialis. Dalam upaya meningkatkan kualitas SDM kesehatan untuk layanan rujukan, berdasarkan ketentuan Pasal 38 dan Pasal 179 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Pasal 539 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dalam rangka pengembangan pelayanan kesehatan lanjutan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat mengembangkan pusat pelayanan unggulan nasional berstandar internasional. Kerja sama yang telah diinisiasi di tahun sebelumnya menjadi peluang untuk meningkatkan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan serta peningkatan kualitas pelayanan unggulan dan penelitian melalui investasi.

8. Peningkatan jumlah dan kapasitas SDM spesialis menjadi peluang strategis dalam mendukung transformasi layanan lanjutan dan SDM kesehatan. Saat ini, dari 117 fakultas kedokteran, hanya 22 yang memiliki program pendidikan dokter spesialis dengan total lulusan sekitar 2.700 per tahun. Jika bergantung sepenuhnya pada skema pendidikan berbasis universitas, kekurangan dokter spesialis akan memerlukan waktu lebih dari satu dekade untuk terpenuhi. Oleh karena itu, pemerintah mendorong pendekatan baru yang lebih adaptif dan potensial: pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit (*hospital-based*). Melalui dukungan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, rumah sakit pendidikan kini dapat berperan sebagai penyelenggara utama pendidikan dokter spesialis disebut Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSPPU). Model ini telah diterapkan di berbagai negara maju dan kini mulai diadopsi di Indonesia sebagai upaya percepatan produksi dokter spesialis.
9. Sejak Juni 2024, enam rumah sakit di bawah Kementerian Kesehatan telah ditugaskan sebagai RSPPU menjadi harapan implementasi model ini yang tentunya sebagai model baru akan menemui kendala dan peluang lain yang perlu terus dimonitor. Data dari situs Web RS Online pada Mei 2025, dari 3283 rumah sakit di Indonesia, sebanyak 470 rumah sakit yang sudah digunakan menjadi tempat pendidikan tenaga medis dan tenaga kesehatan, 121 rumah sakit sudah digunakan menjadi tempat pendidikan dokter spesialis. Keenam RSPPU ini (RSAB Harapan Kita (Ilmu Kesehatan Anak), RSJPD Harapan Kita (Jantung), RSK Dharmais (Onkologi Radiasi), RS Mata Cicendo (Mata), RS Orthopedi Prof. Soeharso (Orthopedi dan Traumatologi), dan RS Otak Prof. Mahar Mardjono (Neurologi)) telah membentuk jejaring dengan 46 rumah sakit dan 3 klinik utama. Antusiasme terhadap skema ini terus meningkat, ditandai dengan banyaknya pengajuan dari rumah sakit lain untuk menjadi RSPPU pada gelombang berikutnya yaitu:
  - a. RSUP dr. I.G.N.G. Ngoerah
  - b. RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta
  - c. RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung
  - d. RSUP Fatmawati Jakarta
  - e. RSUP Dr. M. Djamil Padang
  - f. RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta
  - g. RSUP Dr. Mohamad Hoesin Palembang

- h. RSUP Dr. Kariadi Semarang
- i. RS Jiwa Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
- j. RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
- k. RSUD Abdoel Wahab Sjahranie Samarinda
- l. RSUD Dr. Soedarso
- m. RSUD Dr. Soetomo
- n. RS Mata Cicendo Bandung
- o. RS Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta
- p. Rumah Sakit Universitas Airlangga (RS UNAIR)
- q. Rumah Sakit Universitas Diponegoro (RS UNDIP)
- r. RSUP Dr. Sitanala
- s. RS Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo
- t. RS Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat

Untuk transformasi RS UPT vertikal sebagai berikut :

1. Menjadi *best of the best services (first choice)* di tingkat ASEAN,
2. Melakukan inovasi berdasarkan riset (memiliki Center Research Unit)
3. Pengampuan di transformasi layanan lanjutan.

Indikator Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2024 - 2029 yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029 yang Menjadi Tanggung Jawab Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan

<b>INDIKATOR SASARAN STRATEGIS</b>			
<b>No</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Pengampu</b>
1	Pertumbuhan layanan kesehatan berbasis kedokteran presisi yang diimplementasikan	100%	Dit. PPKR
2	Tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan Kesehatan	77	Dit. MPKR
3	Persentase faskes mencapai akreditasi	33%	Dit. MPKR

	paripurna		
--	-----------	--	--

#### 1. Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan

Untuk mendukung kebijakan nasional pembangunan kesehatan, yakni meningkatkan pelayanan kesehatan guna mencapai derajat kesehatan setinggi-tingginya dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar (*primary health care*) dan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi, maka ditetapkan arah kebijakan Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan yang transformasi sistem Kesehatan sebagai berikut:

- a. Transformasi pelayanan kesehatan rujukan dalam rangka penyediaan layanan rujukan yang lebih berkualitas yang berfokus pada perluasan akses ke pelayanan kesehatan rujukan secara merata dan berkeadilan di seluruh daerah serta pemenuhan Sarana Prasarana Alkes secara berkelanjutan sesuai dengan Rencana Induk Nasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan; Peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan yang mencakup obat, alat kesehatan, sarana dan prasarana dan aspek layanan lainnya, Penataan sistem rujukan secara nasional termasuk upaya untuk pemenuhan RS Rujukan Nasional di setiap provinsi
- b. Transformasi sistem ketahanan kesehatan yang tangguh, pada sisi pelayanan Kesehatan dengan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan berkualitas dan dukungan surveilans berdasarkan laboratorium kesehatan dan jejaring.
- c. Transformasi teknologi kesehatan menuju pada digitalisasi kesehatan dan pemanfaatan teknologi yang lebih luas pada sektor kesehatan yang berfokus pada sistem data kesehatan dan sistem aplikasi kesehatan yang terintegrasi; terbentuknya ekosistem teknologi kesehatan.
- d. Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kebijakan di bidang kesehatan oleh Kementerian Kesehatan yang berfokus pada peningkatan sinergi antara Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah serta kementerian/lembaga lain dan pemangku kepentingan lain; Penguatan kinerja pengelolaan keuangan, kapasitas perencanaan, pemrograman dan penganggaran, sistem pengawasan internal dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Ditjen

## Kesehatan Lanjutan

### 2. Strategi Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan

Dalam melaksanakan kebijakan di atas, dirumuskan strategi sebagai berikut :

- a. Transformasi pelayanan kesehatan lanjutan dalam rangka penyediaan layanan rujukan yang lebih berkualitas.
  - 1) Pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan di Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) dan di Kabupaten / Kota yang belum tersedia rumah sakit, Laboratorium kesehatan dan Unit Pengelola Darah (UPD)
  - 2) Peningkatan Sarana, Prasarana dan Alat kesehatan (SPA) sesuai standar di rumah sakit, Laboratorium Kesehatan dan Unit Pengelola Darah (UPD).
  - 3) Penguatan mekanisme dan sistem rujukan terutama di Rumah Sakit Umum (RSU)
  - 4) Penguatan Rumah Sakit pendidikan dalam *Academic Health System* (AHS) melalui kerjasama antara fakultas kedokteran, RS pendidikan dan pemerintah daerah.
  - 5) Pemanfaatan teknologi untuk deteksi dini dan respons penyakit dalam hal ini adalah telemedicine
  - 6) Penyusunan dan implementasi Panduan Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK)
  - 7) Penguatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di Rumah Sakit, Klinik Utama, Laboratorium Medis, dan Unit Pengelola Darah.
  - 8) Program sister hospital dan stratifikasi layanan unggulan rumah sakit menjadi Center of Excellence ASEAN/Asia
  - 9) Pengampunan jejaring layanan prioritas untuk 10 penyakit prioritas yaitu kanker, jantung, stroke, uronefrologi, Diabetes Melitus, Tuberkulosis, Penyakit Infeksi Emerging, Kesehatan Ibu dan Anak, Gastrohepatologi dan kesehatan jiwa.
- b. Mendukung transformasi sistem ketahanan kesehatan yang tangguh, pada sisi pelayanan Kesehatan dengan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan berkualitas dan dukungan surveilans berdasarkan laboratorium kesehatan dan jejaringnya.
  - 1) Integrasi jejaring laboratorium kesehatan dan peningkatan kapasitas pemeriksaan penyakit infeksi emerging atau penyakit

lainnya.

- 2) Pemantauan dan evaluasi kesiapan laboratorium pemeriksaan penyakit infeksi emerging atau penyakit lainnya.
- c. Mendukung transformasi teknologi kesehatan menuju pada digitalisasi kesehatan dan pemanfaatan teknologi yang lebih luas pada sektor Kesehatan.
- 1) Pengembangan ekosistem teknologi kesehatan informasi teknologi kesehatan dan bioteknologi kesehatan
- d. Mendukung penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kebijakan di bidang kesehatan oleh Kementerian Kesehatan
- 1) Peningkatan sinergi antara Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah serta kementerian/lembaga lain dan pemangku kepentingan lain dalam penyelenggaraan urusan kesehatan
  - 2) Penguatan kinerja pengelolaan keuangan di lingkungan Ditjen Kesehatan Lanjutan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya
  - 3) Penguatan kapasitas perencanaan, pemrograman dan penganggaran oleh Ditjen Kesehatan Lanjutan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya
  - 4) Penguatan sistem pengawasan internal di lingkungan Ditjen Kesehatan Lanjutan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya
- e. Strategi dalam pencapaian target indikator kinerja program (IKP) Ditjen Kesehatan Lanjutan sebagai berikut:
- 1) IKP Persentase Kab/Kota dgn CFR direct obstetric (eklamsi dan pendarahan postpartum) <1%
    - a) Sosialisasi KMK 560/2025 tentang Pedoman PONEK dan Workshop aktivasi kode PONEK di Rumah Sakit
    - b) Koordinasi dengan lintas sektor dan menyusun forum koordinasi dalam penyelenggaraan PONEK di Rumah Sakit
    - c) Menetapkan RS PONEK di kab/kota prioritas, penyusunan dokumen usulan pemenuhan SPA,
    - d) pengembangan dashboard RS PONEK
  - 2) IKP Persentase kab/kota yang memiliki RS dengan kompetensi untuk menangani 10 penyakit prioritas)

- a) Advokasi dan koordinasi kepada provinsi, Kab/Kota, serta lembaga/instansi terkait penyelenggaraan pengampunan pelayanan 10 penyakit prioritas
  - b) Penyusunan rancangan dan/atau revisi NSPK pelayanan 10 penyakit prioritas sesuai standar
  - c) Mensosialisasikan regulasi terkait petunjuk teknis dan lokus pengampunan pelayanan 10 penyakit prioritas
  - d) Pengampunan peningkatan kapasitas pelayanan 10 penyakit prioritas sesuai standar
  - e) Mengusulkan penyediaan SDM ke Ditjen SDM serta penyediaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan untuk rumah sakit jejaring pengampunan pelayanan 10 penyakit prioritas
  - f) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pelayanan 10 penyakit prioritas sesuai standar
- 3) IKP Persentase kab/kota yang memiliki RS dengan layanan trauma center
- a) Penyusunan NSPK serta advokasi dan pembinaan penyelenggaraan pelayanan trauma di RS
  - b) Monitoring dan evaluasi serta analisis penghitungan pencapaian target indikator penyelenggaraan pelayanan trauma di RS
- 4) IKP Jumlah layanan berbasis kedokteran presisi
- a) Penyusunan NSPK sebagai acuan penyelenggaraan kedokteran presisi pada fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau laboratorium pemeriksaan dan analisis genetika paralel dengan proses penetapan Peraturan Menteri Kesehatan .
  - b) Melaksanakan Bimbingan Teknis terhadap rumah sakit koordinator hubs program Biomedical Genome Science Initiative (BGSi). Pengembangan BGSi dilaksanakan untuk mendorong implementasi kedokteran presisi (precision medicine) dalam layanan kesehatan bagi masyarakat.
  - c) Melakukan sosialisasi layanan kedokteran presisi melalui kegiatan workshop kedokteran presisi melibatkan RS Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan provinsi dan RSUD Provinsi serta Lab medis utama untuk potensi replikasi. Pada

tahun 2025 layanan kedokteran presisi yang disosialisasikan adalah NeuroPrecise (layanan berbasis PCR yang dilaksanakan RSPON Prof. Dr. Mahar Mardjono)

- d) Memfasilitasi koordinasi RS hubs BGSi dengan RS yang tertarik untuk bergabung dalam jejaring koordinator Hub maupun menyelenggarakan layanan kedokteran presisi.
- 5) IKP Pertumbuhan RS yang sudah menerapkan hasil riset translasional
  - a) Menyusun instrumen penilaian CRU sesuai standar serta terlibat dalam penyusunan Survei Pemetaan Kapasitas Sentra Uji Klinik Tahun 2025.
  - b) Menyusun dan mensosialisasikan instrumen pendataan hasil riset translasional di RS Vertikal Kemenkes.
  - c) Melaksanakan kegiatan Pendampingan Teknis RS Penyelenggara Penelitian Klinik, meliputi koordinasi, bimbingan teknis dan workshop melibatkan seluruh RS Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan serta RS Pendidikan. Pada tahun 2025, workshop mengambil tema dengan tema "*From Bench to Bedside: Penguatan Layanan Kesehatan melalui Riset Translasional*".
  - d) Koordinasi dan kolaborasi yang baik antar direktorat, unit pelaksana teknis yaitu Balai Besar Biomedis dan Genomika Kesehatan serta the Indonesian Association for the Study of Medicinals (IASMED).
- 6) IKP Jumlah CRU yang sudah memenuhi standar Good Clinical Practice (GCP)
  - a) Penyelenggarakan survei untuk Pemetaan Kapasitas Sentra Uji Klinik terkait kesiapan RS dalam menyelenggarakan uji klinis sesuai standar GCP.
  - b) Koordinasi dan kolaborasi antara Direktorat PPKR dengan INA-CRC BB Binomika serta IASMED dalam penyelenggaraan pelatihan GCP dan pendampingan teknis rumah sakit
  - c) Pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi GCP bagi peneliti CRU rumah sakit yang difasilitasi oleh INA CRC, BB Binomika sebagai upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia penelitian klinik

- d) Pemanfaatan dukungan pendanaan dari Global Fund untuk memperluas cakupan pelatihan dan sertifikasi GCP
- 7) IKP Persentase Fasilitas Kesehatan Lanjutan yang Memenuhi Standar Pelayanan Kesehatan Berkualitas
- a) Peningkatan kepatuhan penerapan clinical pathway 10 penyakit prioritas di RS Pemerintah Jejaring Pengampu Strategi dalam pencapaian target indikator kinerja adalah:
  - b) proses penyusunan pedoman tata kelola keuangan rumah sakit serta peningkatan kemandirian BLU melalui kegiatan workshop dan pendampingan
  - c) keterlibatan aktif berbagai lembaga, yaitu Kementerian Kesehatan -terutama Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan-, Kemendikti Saintek, LAM-PTKes, Kolegium, serta Pimpinan RSPPU dan Perguruan Tinggi Mitra. Sinergi antar lembaga dalam menetapkan regulasi, standar mutu, dan mekanisme akreditasi akan menjadi faktor kunci agar RSPPU dapat berfungsi optimal sebagai penyelenggara pendidikan spesialis yang bermutu
  - d) Koordinasi lintas sektor terkait, Mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi, Melakukan perbaikan pada proses bisnis untuk meningkatkan kerjasama luar negeri
  - e) Menyusun buku Pedoman Tata Kelola Rumah Sakit yang terdiri dari 4 bidang (Keuangan, Pelayanan Medik, Operasional, dan SDM), Melakukan sosialisasi buku Pedoman Tata Kelola Rumah Sakit, Melakukan Bimbingan Teknis bersama Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/ Kota
  - f) Koordinasi lintas sektor dengan stakeholder terkait yaitu: Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Badan Pembangunan Nasional untuk menyusun strategi pembinaan
  - g) Menyusun Pedoman Tata Kelola Rumah Sakit sebagai panduan untuk meningkatkan kualitas layanan, khususnya mengenai waktu pelayanan rawat jalan
  - h) Melakukan Bimbingan Teknis bersama Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota
  - i) Melakukan Sosialisasi Pedoman Tata Kelola Rumah Sakit
- 8) IKP Persentase Tercapainya Akreditasi RS Paripurna yang

Berkualitas

- a) Penguatan kebijakan dan regulasi dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di RS
  - b) Penguatan penyelenggaraan akreditasi RS yang berkualitas dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di RS
  - c) Upaya peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di RS
- 9) IKP Persentase RS pemerintah yang memberikan antibiotika sistemik empirik sesuai standar
- a) Penyediaan akses pemeriksaan identifikasi dan uji kepekaan mikroba melalui kegiatan pemetaan kapasitas rumah sakit, pemetaan kapasitas labkesmas dan penguatan jejaring rujukan
  - b) Penyediaan NSPK yang dapat mendorong standarisasi penerapan program PPRA
  - c) Bimbingan teknis penerapan program PPRA bagi SDM RS dan Dinas Kesehatan
  - d) Pemantauan dan Evaluasi penerapan PPRA melalui sistem pelaporan PPRA ke kemenkes dan kunjungan lapangan
- 10) IKP Tingkat kepuasan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan
- a) Penguatan kebijakan dan regulasi dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di RS
  - b) Upaya peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di RS
  - c) Penguatan penerapan standar pelayanan dan budaya pelayanan prima (service excellence) pada fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan melalui penyusunan pedoman, sosialisasi, dan pembinaan.
  - d) Pelaksanaan pengukuran kepuasan pasien dan Indikator Nasional Mutu (INM) secara berkala serta pemanfaatan hasil pengukuran sebagai dasar perbaikan mutu pelayanan.
  - e) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan peningkatan kepuasan pasien disertai pembinaan dan pendampingan kepada fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan
- 11) IKP Persentase faskes lanjutan dengan SPA kesehatan sesuai

standar

Kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya pemenuhan SPA Rumah Sakit melalui:

- a) Bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi ASPAK
- b) Pemenuhan Alat Kesehatan KJSU dan KIA maupun non-KJSU KIA
- c) Penyusunan Pedoman Teknis Peralatan Kesehatan

Kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya pemenuhan Sarana Prasarana di Unit Pengelola Darah (UPD) melalui:

- a) Melakukan Bimbingan Teknis pemenuhan Sarana Prasarana di Unit Pengelola Darah (UPD)
- b) Monitoring dan Evaluasi pemenuhan Sarana Prasarana di Unit Pengelola Darah (UPD)

12) IKP Rasio tempat tidur (TT) terhadap populasi

- a) Melakukan pemetaan terhadap kondisi ketersediaan tempat tidur di kabupaten/kota, dalam rangka untuk melihat potensi intervensi untuk pemenuhannya, berdasarkan evidence base di wilayah tersebut.
- b) Menyusun Roadmap terhadap prioritas kabupaten/ kota yang akan diusulkan untuk diintervensi berdasarkan kajian evidence base nya.
- c) Menyiapkan usulan kebijakan terkait rencana pemenuhannya.
- d) Melakukan Advokasi, bimbingan teknis dan sosialisasi terhadap kabupaten/kota dalam merumuskan masterplan/ grand design bidang Kesehatan di wilayah kerjanya, sehingga dapat tersusun rencana strategis daerah yang berbasis kebutuhan pelayanan Kesehatan bagi masyarakat.
- e) Melakukan sosialisasi dalam rangka mencapai sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan bidang Kesehatan di wilayah kerjanya.

### C. Kerangka Regulasi

Pada konteks Rencana Strategis Kementerian Kesehatan, kerangka regulasi diperlukan sebagai unsur pendukung pencapaian sasaran strategis kementerian kesehatan. Regulasi bidang kesehatan dibutuhkan dalam upaya mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan bidang kesehatan yang sejalan dengan visi misi Presiden. Kerangka regulasi merupakan pedoman utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan, sekaligus instrumen strategis dalam penguatan tata kelola organisasi yang efektif, akuntabel, dan berkelanjutan. Kerangka regulasi ini disusun untuk memastikan kepastian hukum, konsistensi kebijakan, serta keterpaduan pelaksanaan fungsi kesekretariatan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan. UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) mengamanatkan kerangka regulasi menjadi bagian dari dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini karena dukungan regulasi yang baik dan tepat memerlukan sistem perencanaan yang matang dalam bentuk kerangka regulasi. Kerangka regulasi dalam dokumen perencanaan sektor kesehatan yang dikawal oleh Kementerian Kesehatan bertujuan untuk:

1. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai kebutuhan program pemerintahan dan pembangunan bidang kesehatan;
2. Meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan kesehatan; dan
3. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan peraturan perundang-undangan bidang kesehatan

Kerangka regulasi diarahkan untuk:

1. penyediaan regulasi dari turunan Undang-Undang yang terkait dengan kesehatan;
2. meningkatkan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan;
3. meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan primer;
4. meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan rujukan;
5. meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi persyaratan survei akreditasi;
6. meningkatkan tata kelola pelayanan Kesehatan.

Kerangka regulasi Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan disusun selaras dengan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025–2029 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2025, khususnya dalam mendukung pencapaian tujuan Kementerian Kesehatan yang agile, efektif, dan efisien. Keselarasan ini memastikan bahwa setiap kebijakan dan regulasi internal yang dibentuk

berkontribusi langsung terhadap prioritas pembangunan kesehatan dan penguatan tata kelola pemerintahan di sektor Kesehatan.

Selanjutnya, kerangka regulasi Setditjen Kesehatan Lanjutan dituangkan dalam matriks kebutuhan regulasi dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Tahun 2025–2029, sebagai instrumen perencanaan regulasi yang terarah, terukur, dan berkelanjutan. Matriks tersebut disusun untuk menjamin standardisasi dan kualitas penyelenggaraan layanan kesehatan yang bermutu dan menunjang misi dan tujuan Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan.

Dengan demikian, matriks kerangka regulasi Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan menjadi alat kendali kebijakan yang memastikan bahwa pembentukan dan pelaksanaan regulasi internal berjalan selaras dengan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025–2029, serta mampu menjawab kebutuhan organisasi secara adaptif, responsif, dan berlandaskan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

#### D. Kerangka Kelembagaan

Dalam mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan yang disusun berpedoman pada RPJMN 2025-2029, diperlukan kerangka kelembagaan yang efektif, adaptif, dan kolaboratif. Kerangka kelembagaan dalam hal ini merupakan perangkat struktur organisasi dan ketatalaksanaan yang digunakan untuk mencapai Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan.

Tujuan penyusunan kerangka kelembagaan adalah:

1. Meningkatkan keterkaitan dan koordinasi pelaksanaan RPJMN sesuai dengan visi, misi, tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan.
2. Mempertajam arah kebijakan dan strategi Kementerian Kesehatan sesuai dengan kapasitas organisasi dan dukungan sumber daya aparatur sipil negara.
3. Membangun struktur organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran, untuk menghindari duplikasi fungsi dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan program pembangunan nasional bidang kesehatan.
4. Memperjelas ketatalaksanaan dan meningkatkan profesionalitas sumber daya aparatur sipil negara.

Prinsip penyusunan kerangka kelembagaan adalah:

1. Kerangka kelembagaan disusun dengan mempertimbangkan

- keterkaitan, kontribusi, dan peran Kementerian/Lembaga dalam pencapaian visi dan agenda pembangunan jangka panjang pada RPJPN, prioritas pembangunan pada RPJMN, dan visi - misi presiden.
2. Kerangka kelembagaan disusun mengacu pada kebijakan pembangunan, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, peraturan perundangan-undangan, dan memperhatikan prinsip pengorganisasian yang efektif, efisien dan transparan.
  3. Kerangka kelembagaan disusun untuk mampu menopang dan mewujudkan rencana kerja menjadi kenyataan dengan mempertimbangkan:
    - a. pencapaian visi dan misi kementerian/Lembaga;
    - b. struktur organisasi dan kebutuhan sumber daya yang sesuai dengan kapasitas pengelolaan sumber daya kementerian/lembaga yang bersangkutan; dan
    - c. ketersediaan anggaran untuk kementerian/lembaga yang bersangkutan.

Kerangka kelembagaan yang disusun didapatkan dari proses evaluasi terhadap struktur organisasi yang ada saat ini.

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah mengubah arah penyelenggaraan urusan kesehatan, yaitu upaya kesehatan diwujudkan sebagai pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan lanjutan. Keduanya kemudian didukung oleh adanya standar pelayanan, teknologi informasi, dan penyediaan akses ke kedua pelayanan tersebut. Struktur organisasi Kementerian Kesehatan ke depan perlu menyesuaikan diri dengan perubahan arah penyelenggaraan kesehatan ini. Peta mandat bagi Kementerian Kesehatan diperoleh dengan mengidentifikasi berbagai tugas yang disebutkan dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 serta 58 Undang-Undang lainnya, 89 Peraturan Pemerintah, 33 Peraturan Presiden, 10 Instruksi Presiden, 2 Keputusan Presiden, dan 34 Peraturan lainnya setingkat Peraturan Menteri dan Kepala Lembaga.

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juga telah mengamanatkan penyusunan Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK). RIBK memuat indikator sasaran yang bersifat lintas sektor, lintas pusat dan daerah, serta menjangkau *stakeholder* di luar pemerintahan. Urusan pemerintahan di bidang kesehatan merupakan tugas Kementerian Kesehatan, namun demikian pelaksanaan urusan pemerintahan bidang

kesehatan tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, tetapi juga melibatkan lintas sektor/pemangku kepentingan/ masyarakat. Pemetaan terhadap peran, kewenangan, dan tanggung jawab Kementerian Kesehatan dalam menjalankan urusan bidang kesehatan perlu dilakukan sebagai dasar untuk menentukan desain organisasi Kementerian Kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam kerangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional di bidang kesehatan.

Selanjutnya organisasi Kementerian Kesehatan perlu menguatkan kapasitasnya yang terkait dengan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan. Secara proporsional, organisasi Kementerian Kesehatan harus memiliki kapasitas yang baik dalam hal *rowing* maupun *ruling*. Kerangka kelembagaan Kementerian Kesehatan ke depan harus mencerminkan upaya penyediaan akses dan pelayanan kesehatan yang berkualitas, inovatif, dan berbasis teknologi, serta perluasan cakupan pelayanan kesehatan kesehatan, utamanya dalam pelayanan kesehatan primer (*Primary Health Care*) melalui upaya promotif dan preventif. Selain itu Kementerian Kesehatan juga memegang peranan penting dalam pembentukan sumber daya manusia yang unggul, pengembangan kewilayahan dalam lingkup kesehatan, dan turut menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Mengacu pada RPJPN 2025-2045, kerangka kelembagaan merupakan pendukung pencapaian sasaran Agenda Pembangunan Transformasi Sosial, dimana dalam konteks “kesehatan untuk semua” diarahkan pada inisiatif kelembagaan untuk penguatan peran pemerintah pusat dalam pelayanan kesehatan di daerah kondisi sulit diakses menuju pelayanan kesehatan. Dalam Rancangan RPJMN 2025-2029 kerangka kelembagaan memiliki tujuan untuk mendorong efektivitas kelembagaan melalui peningkatan ketepatan struktur dan proses bisnis organisasi, sehingga pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan secara efektif. Kebijakan kerangka kelembagaan mencakup rumusan tugas, fungsi, kewenangan, peran, proses bisnis, dan struktur dari kementerian/lembaga.

Kerangka kelembagaan Kementerian Kesehatan 2025-2029 juga memperhatikan beberapa isu strategis lain, seperti:

1. Ragam karakteristik daerah di Indonesia dari aspek geografis, sosial, budaya hingga ke kapasitas fiskal.
2. Komitmen Indonesia untuk pencapaian target tujuan kesehatan SDGs
3. hingga tahun 2030.
4. Penguatan desentralisasi pembangunan, baik di tingkat provinsi,

kabupaten/kota hingga ke desa.

5. Arah baru kebijakan reformasi birokrasi, dan lainnya.

Kementerian Kesehatan dikembangkan sebagai organisasi yang tepat fungsi (sesuai amanat peraturan dan arahan strategis), tepat proses (sesuai dengan peta proses bisnis), dan tepat ukuran (sesuai dengan analisis beban kerja), serta dapat bersifat *making delivered* untuk seluruh program kebijakan yang dihasilkan dan menjamin manfaat program dapat dirasakan oleh masyarakat. Penamaan setiap unit yang ada di struktur organisasi Kementerian Kesehatan juga dirancang menjadi istilah yang lebih ringkas, menjelaskan isi organisasi serta menjadi istilah yang jamak di dunia kesehatan secara global.

Desain organisasi disusun dengan memperhatikan mandat konstitusi, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dinamika lingkungan strategis pembangunan kesehatan, Sistem Kesehatan Nasional, dan kebijakan desentralisasi. Penguatan kelembagaan juga diarahkan untuk mendukung reformasi birokrasi melalui penataan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*), pengurangan tumpang tindih kewenangan, serta penegasan peran, tanggung jawab, dan mekanisme koordinasi horizontal dan vertikal dalam pelaksanaan Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029.

Kerangka kelembagaan Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan Tahun 2025-2029 meliputi:

1. sinkronisasi nomenklatur dan proses bisnis organisasi dengan mandat program dan kegiatan;
2. penguatan kebijakan/NSPK sebagai rujukan penyelenggaraan layanan kesehatan lanjutan yang bermutu dan berkeadilan;
3. penguatan pemantauan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi kinerja program/kegiatan;
4. penguatan dukungan manajemen internal meliputi SDM, tata kelola, dan sistem informasi;
5. penguatan akses dan mutu pelayanan kesehatan;
6. penguatan sinergi pusat-daerah dan kolaborasi lintas sektor;
7. penguatan program prioritas pembangunan kesehatan; dan
8. penapisan teknologi kesehatan sesuai kebutuhan dan bukti ilmiah.

## BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Memperhatikan Rencana Strategi (Renstra) Kementerian Kesehatan 2025-2029, visi dan misi, tujuan, strategi dan sasaran strategis sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka perlu disusun target kinerja dan kerangka pendanaan kegiatan-kegiatan 2025-2029.

Adapun Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan mempunyai 2 (dua) program yaitu:

1. Program Pelayanan Kesehatan Lanjutan
2. Program Dukungan Manajemen

Pada Program Pelayanan Kesehatan terdapat beberapa kegiatan, meliputi:

1. Kegiatan Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan
2. Kegiatan Pembinaan Pelayanan Pengembangan Kesehatan Rujukan
3. Kegiatan Pembinaan Pelayanan Klinis
4. Kegiatan Pembinaan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan
5. Kegiatan Pembinaan Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan

### A. Target Kinerja

Target kinerja merupakan penilaian dari pencapaian kegiatan yang diukur secara berkala dan dievaluasi pada akhir tahun 2029. Sasaran kinerja dihitung secara kumulatif selama lima tahun dan berakhir pada tahun 2029. Adapun uraian Indikator Kinerja Sasaran Strategis, indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) adalah sebagai berikut:

#### 1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Visi Presiden 2025-2029, yakni: “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2025” yang diterjemahkan ke dalam delapan misi. Salah satu misinya adalah meningkatkan SDM Indonesia yang Berkualitas. Untuk menuju SDM Indonesia yang berkualitas, maka Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan harus mencapai 2 (dua) Tujuan Strategis yang dijabarkan dalam Sasaran Strategis beserta ISS sebagai berikut:

**Sasaran Program Ditjen Kesehatan Lanjutan Tahun 2025-2029**

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
	Sasaran Program: ▪ Meningkatnya pemerataan akses dan mutu pelayanan kesehatan lanjutan					
1	Persentase fasyankes lanjutan dengan SPA sesuai standar	45	60	70	75	80
2	Rasio Tempat Tidur Terhadap Populasi	1,5	1,62	1,75	1,87	2
	Sasaran Program: ▪ Meningkatnya kualitas layanan obstetric di RS					
3	Persentase kab/kota dengan CFR direct obstetric (eclampsia dan pendarahan porstpartum) < 1%	25	35	55	70	80
	Sasaran Program: ▪ Meningkatnya pemerataan akses dan mutu pelayanan kesehatan lanjutan					
4	Persentase kab/kota yang memiliki RS dengan kompetensi untuk menangani 10 penyakit prioritas	25	40	60	80	100
5	Persentase kab/kota yang memiliki RS dengan layanan trauma center	10	20	40	60	87
	Sasaran Program: Meningkatnya kapabilitas riset di RS					
6	Jumlah layanan berbasis kedokteran presisi	4	7	10	13	15
7	Pertumbuhan RS yang sudah menerapkan hasil riset translasional	10	25	50	100	174
8	Jumlah CRU yang sudah memenuhi standar GCP	3	6	9	12	15
	Sasaran Program: Meningkatnya pemerataan akses dan mutu pelayanan kesehatan lanjutan					
9	Persentase RS pemerintah terakreditasi paripurna	38	45	60	75	85

	10	Tingkat kepuasan pasien di fasilitas kesehatan lanjutan	77	78	79	79,5	80
	11	Persentase RS Pemerintah yang patuh memberikan antibiotik sistemik empirik sesuai standar $\geq$ 80%	10	15	30	45	60
	12	Persentase Fasyankes lanjutan yang memenuhi standar pelayanan kesehatan berkualitas	50	55	60	65	70
		Sasaran Program: Meningkatnya kolaborasi fasilitas pelayanan kesehatan dalam mendukung pelaksanaan program prioritas					
	13	Persentase puskesmas yang melakukan kolaborasi dengan FKTP lain dalam mendukung pelaksanaan program prioritas	84,17	0	0	0	0
		Sasaran Program: Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan					
	14	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan	77	78	80	82	85
	15	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan	92,35	92,55	92,75	92,95	93,15
	16	Indeks kualitas SDM Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan	81	82	83	84	85
	17	Nilai maturitas manajemen risiko Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan	3,95	4	4,05	4,1	4,15
	18	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan	95	95	95	95	95
	19	Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan	96	96	96	96	96

Indikator Kinerja Ditjen Kesehatan Lanjutan Tahun 2025

<b>INDIKATOR SASARAN STRATEGIS</b>		
<b>No</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
1	Pertumbuhan layanan kesehatan berbasis kedokteran presisi yang diimplementasikan	100%

2	Tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan Kesehatan	77
3	Persentase faskes mencapai akreditasi paripurna	33%
<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>		
No	Indikator	Target
1	Persentase faskes lanjutan dengan SPA sesuai standar	45%
2	Rasio Tempat Tidur Terhadap Populasi	1,5
3	Persentase kab/kota dengan CFR direct obstetric (eclampsia dan pendarahan porstpartum) < 1%	25 %
4	Persentase kab/kota yang memiliki RS dengan kompetensi untuk menangani 10 penyakit prioritas	25 %
5	Persentase kab/kota yang memiliki RS dengan layanan trauma center	10%
6	Jumlah layanan berbasis kedokteran presisi	4 layanan
7	Pertumbuhan RS yang sudah menerapkan hasil riset translasional	10 RS
8	Jumlah CRU yang sudah memenuhi standar GCP	3 CRU
9	Persentase RS pemerintah terakreditasi paripurna	38%
10	Tingkat kepuasan pasien di fasilitas kesehatan lanjutan	77
11	Persentase RS Pemerintah yang patuh memberikan antibiotik sistemik empirik sesuai standar $\geq 80\%$	10%
<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>		
No	Indikator	Target

12	Persentase Faskes lanjutan yang memenuhi standar pelayanan kesehatan berkualitas	50%
13	Persentase puskesmas yang melakukan kolaborasi dengan FKTP lain dalam mendukung pelaksanaan program prioritas	84,17%
14	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan	77
15	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan	92,35
16	Indeks kualitas SDM Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan	81
17	Nilai maturitas manajemen risiko Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan	3,95
18	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan	95
19	Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan	96
<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b>		
No	Indikator	Target
1	Jumlah Kab/Kota dengan RSUD kelas D yang ditingkatkan menjadi kelas C	22
2	Persentase RS Pemerintah Daerah yang memenuhi Ketersediaan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standar	45 %
3	Persentase-UTD UPD milik pemerintah dengan SPA sesuai standar	35 %
4	Kab/Kota dengan wilayah	27

	berciri kepulauan yang dilayani RS kapal sesuai standar	
5	Jumlah kab/kota yang memenuhi rasio TT minimal 2:1000	124
6	Persentase Kabupaten/Kota dengan RS PONEK sesuai standar	25%
7	Persentase provinsi dengan RS yang memenuhi kapasitas pelayanan kesehatan ibu-anak, kanker, Jantung, Stroke, dan ginjal sesuai standar	40%
<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b>		
No	Indikator	Target
8	Persentase kab/kota dengan RS yang memenuhi kapasitas pelayanan kesehatan ibu-anak, kanker, Jantung, Stroke, dan ginjal sesuai standar	20%
9	Persentase RS Pemerintah dengan kompetensi minimal strata Madya untuk pelayanan DM, TBC, PIE, Gastrohepato dan/atau Kesehatan Jiwa sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan	50%
10	Persentase RS yang melaksanakan dan melaporkan audit medis	50%
11	Jumlah RS yang memberikan pelayanan trauma center di Kab/Kota	92 RS
12	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem rujukan online nasional	20%
13	Jumlah Rumah Sakit Pemerintah yang mampu tata laksana korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	50 RS

	(KtPA)	
14	Persentase RS yang memberikan layanan geriatri terpadu	20 %
15	Jumlah fasyankes yang menyelenggarakan pelayanan telemedisin	400
16	Jumlah rumah sakit yang siap dan mendukung pelayanan wisata medis	30 RS
17	Persen populasi direkrut untuk penyimpanan biobank	97%
18	Persen populasi yang menggunakan farmakogenomika	60%
19	RS yang sudah memiliki CRU sesuai standar	43 RS
20	Peneliti CRU di RS yang tersertifikasi GCP	100
<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b>		
<b>No</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
21	Persentase Kabupaten Kota Memenuhi Standar Kebutuhan Darah di wilayahnya	20%
22	Persentase Rumah Sakit memberikan layanan ramah penyandang disabilitas	40%
23	Jumlah RS BLU dan BLUD yang sudah memiliki ketepatan waktu pelayanan rawat jalan	450
24	Jumlah RS BLU dan BLUD yang sudah memiliki ketepatan waktu visite dokter pelayanan rawat inap	450
25	Jumlah RS yang menyelenggarakan Pendidikan spesialis dan / atau sub spesialis berbasis RS	10
26	Jumlah RS yang mengembangkan layanan unggulan / center of excellence melalui kerja	68

	sama dengan RS atau Institusi Kesehatan Luar Negeri	
27	Persentase RS yang mencapai target INM (Indikator Nasional Mutu)	8
28	Persentase Klinik Utama yang mencapai target Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan yang ditentukan	8
29	Persentase Rumah Sakit yang mengimplementasikan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA)	30
30	Jumlah kab/kota yang memenuhi rasio TT minimal 2:1000	124
31	Jumlah RS Pemerintah yang Memenuhi Tingkat Maturitas Kemandirian	5

## B. Kerangka Pendanaan

Untuk mencapai target kinerja sasaran strategis Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan serta menjalankan program serta kegiatannya maka diperlukan alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan juga kemampuan Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan. Untuk itu berikut ini adalah kerangka pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan sampai dengan tahun 2024.

Tabel Kerangka Pendanaan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan

No	Program/Kegiatan	Pagu Indikatif (ribu rupiah)			Keterangan
		2025	2026	2027	
A.	Pelayanan Kesehatan Lanjutan	17.265.704.539	17.908.597.658	18.795.252.710	
1	Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan	1.479.136.345	1.576.102.551	1.654.907.679	

2	Pembinaan Pelayanan Pengembangan Kesehatan Rujukan	13.367.040.000	5.906.088.000	-	
3	Pembinaan Pelayanan Klinis	59.612.966	73.752.077	77.439.681	
4	Pembinaan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan	14.750.110	22.038.224	23.140.135	
5	Pembinaan Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan	42.700.185	22.852.400	-	
6	Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis	15.652.281.625	16.157.899.634	16.965.794.616	
B.	Program Dukungan Manajemen	3.315.969.834	3.197.857.169	3.357.750.027	
1	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Kesehatan Lanjutan	3.315.969.834	3.197.857.169	3.357.750.027	

Guna memenuhi kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan sebagaimana tersebut diatas, maka dana yang digunakan dapat bersumber dari APBN baik yang bersumber dari Rupiah Murni, Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP), Badan Layanan Umum (BLU), Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN).

Untuk mendukung upaya kesehatan di daerah, Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan memberikan porsi anggaran lebih besar bagi daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), Dekonsentrasi dan kegiatan lain yang diperuntukkan bagi daerah.

BAB V  
PENUTUP

Rencana Aksi Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan 2025-2029 ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Dengan demikian, Unit Kerja di lingkup Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan mempunyai target kinerja yang telah ditetapkan dan akan dievaluasi pada pertengahan (2025) dan akhir periode 5 tahun (2029) sesuai ketentuan yang berlaku.

Jika di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Rencana Aksi Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan 2025-2029 ini, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya

DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN,

ttd.

AZHAR JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Ketua Tim Kerja Hukum  
Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan



Rico Mardiansyah, SH, MH  
NIP. 198603192010121004

LAMPIRAN 2  
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
 KESEHATAN LANJUTAN KEMENTERIAN  
 KESEHATAN  
 NOMOR HK.02.02/D/6313/2025  
 TENTANG RENCANA AKSI PROGRAM  
 DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN  
 LANJUTAN KEMENTERIAN KESEHATAN  
 TAHUN 2025-2029

**MATRIKS KINERJA PROGRAM KESEHATAN LANJUTAN TAHUN 2025-2029**

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2025	
<b>PROGRAM KESEHATAN LANJUTAN</b>				<b>29.225.144</b>	
<b>Sasaran Strategis: 2.1 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan primer, lanjutan dan labkes</b>					
	ISS 14: Persentase kabupaten/kota dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar		55%		Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas
					Kontributor:
					Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan
	ISS 16: Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi paripurna		33%		Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan
					Kontributor:

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2025	
	ISS 17: Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan		77 (Nilai)		Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan Kontributor: Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas
<b>Sasaran Strategis: 5.1 Meningkatnya kualitas ekosistem teknologi kesehatan dan uji klinis</b>					
	ISS 31: Pertumbuhan layanan kesehatan berbasis kedokteran presisi yang diimplementasikan		100%		Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan
<b>024.DG Program Pelayanan Kesehatan dan JKN</b>				<b>26.081.375</b>	
	<b>Sasaran Program: Meningkatnya kualitas layanan obstetric di RS</b>				
	IKP 1.4 Persentase Kab/kota dengan CFR direct obstetric (eclampsia & pendarahan postpartum) < 1%		25%		Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan
	<b>Sasaran Program: Meningkatnya pemerataan akses dan mutu pelayanan kesehatan lanjutan</b>				
	IKP 14.1 Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan dengan SPA Kesehatan sesuai standar		45%		Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan
	IKP 14.2 Rasio tempat tidur (TT) terhadap populasi		1,5 per 1.000 penduduk		Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan
	IKP 16.3 Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan yang memenuhi standar pelayanan kesehatan berkualitas		50%		Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan
	IKP 16.4 Persentase rumah sakit pemerintah terakreditasi paripurna		38%		Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan
	IKP 16.5 Persentase kab/kota yang memiliki RS dengan kompetensi untuk menangani 10 penyakit prioritas		25%		Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan
	IKP 16.6 Persentase RS Pemerintah yang patuh memberikan antibiotik sistemik empirik sesuai standar		10%		Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2025	
	IKP 16.7 Persentase Kab/kota yang memiliki RS dengan layanan trauma center		10%		Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan
	IKP 17.2 Tingkat kepuasan pasien di Fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan		77		Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan
	IKP.17.4.Persentase puskesmas yang melakukan kolaborasi dengan FKTP lain dalam mendukung pelaksanaan program prioritas		84,17%		Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan
	<b>Sasaran Program: meningkatnya layanan berbasis kedokteran presisi</b>				
	IKP 31.1 Jumlah layanan berbasis kedokteran presisi		4 layanan		Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan
	<b>Sasaran Program: meningkatnya kapabilitas riset di RS</b>				
	IKP 32.2 Pertumbuhan RS yang sudah menerapkan hasil riset translasional		10 RS		Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan
	IKP 32.3 Jumlah CRU yang sudah memenuhi standar GCP		3 RS		Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan
<b>2051. Kegiatan Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan</b>				<b>8.372.593</b>	
<b>Sasaran Kegiatan: Kab/Kota dengan RSUD kelas D yang ditingkatkan menjadi kelas C</b>					
	IKK 14.1.1 Kab/Kota dengan RSUD tipe D yang ditingkatkan menjadi tipe C		22 kab/kota		Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan - Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan
	Output: 2051. QEG.001 RS Berkualitas di Kab/Kota (Pemenuhan PHTC bidang kesehatan)	Pusat	22 paket		
	Output: 2051.UAE.012 Pemantauan dan Evaluasi RS kelas D/D Pratama yg ditingkatkan kualitasnya menjadi kelas C	Pusat	22 laporan		
<b>Sasaran Kegiatan: Kab/Kota dengan wilayah berciri kepulauan yang dilayani RS kapal sesuai standar</b>					
	IKK 14.1.6 Kab/Kota dengan wilayah berciri kepulauan yang dilayani RS kapal sesuai standar		27 kab/kota		Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan - Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan
	Output: 2051.QEG.002-Bantuan Operasional RS	Pusat	9 RS kapal		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2025	
	Kapal (PHTC)				
-	<b>Sasaran Kegiatan: Kab/kota yang memenuhi rasio tempat tidur (TT) minimal 2:1000</b>				
-	IKK 14.2.1 Jumlah kab/kota yang memenuhi rasio tempat tidur (TT) minimal 2:1000		124 kab/kota		Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan - Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan
	Output: 2051.RBV.001 Pembangunan dan Pengembangan RS UPT Vertikal Riau	Pusat	1 Unit		
	<b>Sasaran Kegiatan: RS Kab/Kota yang telah memenuhi standar ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standar</b>				
	IKK 14.1.2 Persentase RS Pemerintah Daerah yang memenuhi Ketersediaan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standar		45%		Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan - Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan
	Output: 2051.AEF.001 Sosialisasi kualitas fasilitas kesehatan terhadap pelayanan masyarakat	Pusat	21.000 orang		
	Output: 2051.AFA.001 Revisi PMK 40 tahun 2022 terkait Bangunan dan Prasarana di RS	Pusat	2 Pedoman		
	Output: 2051.PEF.003 Sosialisasi dan diseminasi bidang alkes RS yang ditetapkan sebagai jejaring penyakit prioritas nasional	Pusat	250 Orang		
	Output: 2051.PFA.004 Pedoman Pemenuhan Alat Kesehatan Fasilitas pelayanan kesehatan Rujukan untuk Pelayanan 9 penyakit Prioritas sesuai standar	Pusat	3 NSPK		
	Output: 2051.QDB.005 RS yang diberikan bimbingan teknis ASPAK untuk ketersediaan sarana prasarana dan alat kesehatan	Pusat	126 Lembaga		
	Output: 2051.QDB.009 Fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta yang dilakukan pembinaan teknis ASPAK	Pusat	32 Lembaga		
	Output: 2051.QDB.013 Pembinaan teknis pemenuhan dan pengembangan sarana, prasarana dan alat kesehatan UTD	Pusat	32 Lembaga		
	Output: 2051.RAB.006 Pemenuhan Peralatan Onkologi RS UPT Surabaya	Pusat	1 Paket		
	Output: 2051.RAB.009 Pengadaan peralatan	Pusat	4077 unit		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2025	
	Kesehatan dan pendukungnya untuk Rumah Sakit (SIHREN) (LR - 11)				
	Output: 2051.RAB.010 Pemenuhan Peralatan Onkologi RS UPT Makassar (IsDB Rujukan)	Pusat	1 Paket		
	Output: 2051.RBV.002 Pembangunan dan Pengembangan Gedung Genebank Indonesia	Pusat	1 Unit		
	Output: 2051.UAE.006 Alkes PDN yang dilakukan Monitoring dan Evaluasi	Pusat	37 Laporan		
	Output: 2051.UAE.010 Monitoring dan Evaluasi Pasca berakhirnya Program/Proyek I-SPHERE	Pusat	3 Laporan		
	Output: 2051.UAE.011 Monitoring Pemanfaatan Bantuan Alat Kesehatan dan Penunjang BMN SIHREN	Pusat	11 Laporan		
	<b>Sasaran Kegiatan: UPD milik pemerintah dengan SPA sesuai standar</b>				
	IKK 14.1.3 Persentase UPD milik pemerintah dengan SPA sesuai standar		35%		Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan - Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan
	Output: 2051.QDB.013 Pembinaan teknis pemenuhan dan pengembangan sarana prasarana dan alat kesehatan UTD	Pusat	32 Lembaga		
	Output: 2051.UAE.004 Sarana Prasarana dan Alat UPD yang dilakukan monitoring dan evaluasi	Pusat	37 Laporan		
<b>2087. Kegiatan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer</b>				<b>4.274</b>	
	<b>Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kolaborasi Puskesmas dan Fasilitas pelayanan kesehatan Primer lainnya dalam pemberian pelayanan</b>				
	IKK 17.4.1 Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan redistribusi kepesertaan dari puskesmas ke FKTP swasta		100%		Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan - Direktorat Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan
	Output: 2087.AEC.001 Kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Implementasi program redistribusi kepesertaan JKN	Pusat	1 kesepakatan		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2025	
	Output: 2087.AEF.004 Advokasi dan sosialisasi pelayanan kesehatan primer	Pusat	1 orang		
	Output: 2087.AFA.018 Pedoman pelayanan kesehatan primer dan jaminan kesehatan	Pusat	1 NSPK		
	Output: 2087.AFA.020 NSPK Standarisasi klinis di FKTP	Pusat	1 NSPK		
	Output: 2087.AFA.021 NSPK Rujuk balik di FKTP	Pusat	1 NSPK		
	Output: 2087.AFA.022 Juknis pelaksanaan Kepmenkes nomor: HK.01.07/Menkes/2194/2023 tentang rasio dokter dan dokter gigi terhadap kepesertaan jaminan kesehatan nasional di FKTP	Pusat	1 NSPK		
	Output: 2087.AFA.023 Pedoman penyelenggaraan praktik mandiri tenaga medis/tenaga kesehatan	Pusat	1 NSPK		
	Output: 2087.BDB.002 Implementasi care pathway di FKTP	Pusat	1 Lembaga		
	Output: 2087.BIE.001 Pengawasan puskesmas, klinik pratama dan tempat praktik mandiri dokter (TPMD) dalam tata laksana kasus rujukan non spesialis	Pusat	1 Pemerintah daerah		
	Output: 2087.BIF.001 Pengawasan perizinan berusaha klinik	Pusat	1 Layanan		
	Output: 2087.BKA.001 Pemantauan kesiapan pelayanan kesehatan dalam rangka antisipasi hari besar keagamaan, major event dan internasional	Pusat	1 kelompok masyarakat		
	Output: 2087.FAE.007 Monitoring dan evaluasi penerapan standarisasi klinis di FKTP	Pusat	1 laporan		
	Output: 2087.FAE.008 Laporan pembinaan dan pengawasan pelayanan kesehatan primer lain dan jaminan kesehatan	Pusat	1 laporan		
	Output: 2087.FBA.004 Pembinaan perangkat daerah dalam menerapkan standar pelayanan klinis	Pusat	1 daerah (Prov/Kab/Kota)		
	Output: 2087.FBA.005 Pembinaan dinas kesehatan dalam rangka perizinan berusaha klinik dan praktik mandiri tenaga medis/tenaga kesehatan	Pusat	1 daerah (Prov/Kab/Kota)		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2025	
	Output: 2087.FBA.006 Pembinaan perangkat daerah dalam penerapan rujuk balik penyakit kronis di FKTP	Pusat	1 daerah (Prov/Kab/Kota)		
	Output: 2087.FBA.007 Piloting pelayanan paliatif terintegrasi di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama	Pusat	1 daerah (Prov/Kab/Kota)		
	Output: 2087.PFA.005 NSPK integrasi pelayanan kesehatan dengan pelibatan FKTP lain	Pusat	1 NSPK		
	Output: 2087.UAE.002 Monitoring dan evaluasi implementasi integrasi pelayanan kesehatan di puskesmas dan FKTP lain	Pusat	1 laporan		
	Output: 2087.UBA.001 Pembinaan perangkat daerah dalam penguatan implementasi integrasi pelayanan program prioritas di puskesmas dengan klinik pratama dan TPMD	Pusat	1 daerah (Prov/Kab/Kota)		
	Output: 2087.UBA.002 Pembinaan penyelenggaraan rekam medis elektronik di klinik serta praktik mandiri tenaga medis/tenaga kesehatan	Pusat	1 daerah (Prov/Kab/Kota)		
<b>2090. Kegiatan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan</b>				<b>162.266</b>	
<b>Sasaran Kegiatan: Meningkatnya persentase Kab/Kota yang memiliki RS ponek sesuai standar</b>					
	IKK 1.4.1 Persentase Kab/Kota dengan RS PONEK sesuai standar		25%		Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan - Direktorat Pelayanan Klinis
	Output: 2090.ABG.001 Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK)	Pusat	10 Rekomendasi kebijakan		
	Output: 2090.AFA.001 NSPK Standarisasi Klinis	Pusat	2 NSPK		
	Output: 2090.QDB.001 Pembinaan RS PONEK serta Operasi Sectio Caesarea Darurat dalam Waktu Kurang Atau Sama Dengan 30 Menit	Pusat	570 RS		
<b>Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kab/kota yang memenuhi kebutuhan darah di wilayahnya</b>					
	IKK 14.1.4 Persentase Kab/Kota Memenuhi Standar Kebutuhan Darah di wilayahnya	Pusat	20 %		Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan - Direktorat Pelayanan Klinis

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2025	
	Output: 2090.BDB.105 Implementasi Pelayanan Darah di Fasilitas pelayanan kesehatan Sesuai Standar	Pusat	4 Lembaga		
	Output: 2090.AFA.107 Pedoman penyelenggaraan pelayanan darah	Pusat	1 Pedoman		
<b>Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Tata Kelola Klinis Kesehatan Lanjutan</b>					
	IKK 16.3.3 Jumlah Rumah Sakit yang mampu tata laksana korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtPA)		50 RS		Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan - Direktorat Pelayanan Klinis
	Output: 2090.QDB.005 Implementasi tatalaksana korban KtPA di rumah sakit	Pusat	177 Lembaga		
	IKK 16.3.4 Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem rujukan online nasional		20%		Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan - Direktorat Pelayanan Klinis
	Output: 2090.PFA.012 Pedoman Interoperabilitas sirsute	Pusat	1 NSPK		
	Output: 2090.ABG.002 Rancangan pedoman klasifikasi rumah sakit	Pusat	1 rekomendasi kebijakan		
	Output: 2090.QDB.003 Fasyankes yang mengimplementasikan Sistem Rujukan Terintegrasi	Pusat	100 lembaga		
	Output: 2090.UAB.001 Pengembangan Sistem Rujukan Terintegrasi pada Fasilitas pelayanan kesehatan	Pusat	1 sistem informasi		
	IKK 16.4.3 Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan dan melaporkan audit medis		50%		Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan - Direktorat Pelayanan Klinis
	Output: 2090.BDB.001 Pembinaan Implementasi pelayanan sesuai standar	Pusat	37 RS		
	Output: 2090.BDB.006 Implementasi NSPK Standarisasi Klinis	Pusat	345 RS		
	IKK 16.4.6 Persentase RS yang memberikan layanan geriatri terpadu		20%		Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan - Direktorat Pelayanan Klinis

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2025	
	Output: 2090.QDB.004 RS yang diberikan pembinaan dalam pelayanan geriatri sesuai standar	Pusat	50 Lembaga		
	IKK 16.5.1 Persentase provinsi dengan RS yang memenuhi kapasitas pelayanan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, ginjal sesuai standar		40%		Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan - Direktorat Pelayanan Klinis
	Output: 2090.AEF.001 Sosialisasi pelayanan kesehatan rujukan	Pusat	21.000 orang		
	Output: 2090.UAE.002 Monitoring evaluasi layanan prioritas KJSU KIA	Pusat	23 laporan		
	Output: 2090.SCM.001 Pelatihan layanan jantung, stroke, Uronefrologi dan Kesehatan Ibu dan Anak (SIHREN)	Pusat	556 orang		
	Output: 2090.SCM.002 Pelatihan layanan kanker (SIHREN)	Pusat	1.197 orang		
	Output: 2090.QDB.006 RS yang ditingkatkan kompetensi dalam layanan jantung	Pusat	320 Lembaga (RS)		
	Output: 2090.QDB.007 RS yang ditingkatkan kompetensi dalam layanan kanker	Pusat	321 Lembaga (RS)		
	Output: 2090.QDB.008 RS yang ditingkatkan kompetensi dalam layanan stroke	Pusat	314 Lembaga (RS)		
	IKK 16.5.2 Persentase kab/kota dengan RS yang memenuhi kapasitas pelayanan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, ginjal sesuai standar		20%		Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan - Direktorat Pelayanan Klinis
	Output: 2090.QDB.011-RS yang ditingkatkan kompetensi dalam layanan uronefrologi	Pusat	318 RS		
	Output: 2090.QDB.O15-RS yang ditingkatkan kompetensi dalam layanan kesehatan ibu dan anak	Pusat	318 RS		
	IKK 16.5.3 Persentase RS Pemerintah dengan kompetensi minimal strata Madya untuk pelayanan DM, TBC, PIE, Gastrohepato dan/atau Kesehatan Jiwa, sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan		50%		Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan - Direktorat Pelayanan Klinis
	Output: 2090.UAE.003 Monitoring evaluasi layanan prioritas Non KJSU KIA	Pusat	15 laporan		
	Output: 2090.PBG.011 Pedoman tentang	Pusat	1 rekomendasi kebijakan		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2025	
	pengampuan layanan prioritas Non KJSU KIA				
	Output: 2090.QDB.009-RS yang ditingkatkan kompetensi dalam layanan respirasi dan TB	Pusat	80 Lembaga (RS		
	Output: 2090.QDB.010 RS yang ditingkatkan kompetensi dalam layanan diabetes mellitus	Pusat	177 Lembaga (RS		
	Output: 2090.QDB.012 RS yang ditingkatkan kompetensi dalam layanan penyakit infeksi emerging	Pusat	30 Lembaga (RS		
	Output: 2090.QDB.013 RS yang ditingkatkan kompetensi dalam layanan kesehatan jiwa	Pusat	100 Lembaga (RS		
	Output: 2090.QDB.014 RS yang ditingkatkan kompetensi dalam layanan gastrohepatologi	Pusat	40 Lembaga (RS		
	IKK 16.7.1 Jumlah RS yang memberikan pelayanan trauma center di Kab/kota		51 RS		Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan - Direktorat Pelayanan Klinis
	Output: 2090.AFA.007 Pedoman pelayanan mata di RS	Pusat	1 NSPK		
	Output: 2090.AFA.008 Pedoman pelayanan gigi dan mulut di RS	Pusat	1 NSPK		
	Output: 2090.AFA.009 Rancangan KMK pelayanan pengampuan THT di rumah sakit	Pusat	1 NSPK		
	Output: 2090.AFA.010 Rancangan KMK pelayanan pengampuan Orthopedi di rumah sakit	Pusat	1 NSPK		
	Output: 2090.BDB.007 RS yang diberikan pembinaan layanan mata	Pusat	38 RS		
	Output: 2090.BDB.009 RS yang diberikan pembinaan pelayanan gigi dan mulut	Pusat	38 RS		
	Output: 2090.BDB.011 Pembinaan teknis pelayanan THT pada RS	Pusat	40 RS		
	Output: 2090.BDB.012 Pembinaan teknis pengampuan pelayanan orthopedi pada RS	Pusat	40 RS		
<b>Sasaran Kegiatan: Meningkatnya RS yang melakukan pengembangan pelayanan kesehatan lanjutan</b>					
	IKK 16.3.1 Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan telemedicine		400 Fasilitas pelayanan kesehatan		Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan - Direktorat

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2025	
					Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan
	Output: 2090.FAE.101 Monitoring dan evaluasi pengembangan pelayanan berbasis AI, robotik, telemedisin dan TRB	Pusat	6 Laporan		
	Output: 2090.FAE.102- Bimbingan Teknis Pengembangan Pelayanan Berbasis AI dan Robotik	Pusat	5 Laporan		
	Output: 2090.QDB.101 Bimbingan Teknis dan Supervisi Terkait Pengembangan Pelayanan Telemedisin	Pusat	100 Lembaga		
	Output: 2090.UAB.101 Pengembangan dan Integrasi Sistem Aplikasi Telemedisin	Pusat	1 Sistem Informasi		
	Output: 2090.AFA.103 Pedoman penyelenggaraan pelayanan teknologi reproduksi berbantu	Pusat	1 pedoman		
	Output: 2090.BIC.101 Bimbingan teknis dan supervisi terkait penyelenggaraan pelayanan teknologi reproduksi dengan bantuan	Pusat	50 lembaga		
	Output: 2090. BDB.104 Pendampingan teknis RS penyelenggara pengembangan bedah robotik	Pusat	6 lembaga		
	IKK 16.3.6 Jumlah RS yang siap dan mendukung pelayanan wisata medis		30 RS		Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan - Direktorat Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan
	Output: 2090.QDB.105 Pendampingan Teknis dan Supervisi Rumah Sakit Penyelenggara Pelayanan Wisata Medis	Pusat	19 lembaga		
	Output: 2090.PFA.102 Permenkes tentang Pelayanan Wisata Medis	Pusat	1 NSPK		
	Output: 2090.AFA.108 Petunjuk teknis pelayanan kesehatan dan evakuasi medis pada event nasional dan internasional	Pusat	1 Pedoman		
	Output: 2090.AFA.105 Pedoman penyelenggaraan pelayanan transplantasi organ dan/atau jaringan	Pusat	1 pedoman		
	Output: 2090.AFA.106 Standar pusat diagnostik	Pusat	1 Pedoman		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2025	
	Output: 2090. BDB.102 Implementasi pelayanan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Pusat	4 lembaga		
	Output: 2090.BAH.101 Pelayanan kesehatan yang terstandar pada event nasional dan internasional	Pusat	8 Layanan		
	Output: 2090.FAE.104 Monitoring dan evaluasi penunjang pelayanan kesehatan rujukan	Pusat	6 laporan		
	Output : 2090.FBA.101 Pembinaan Wilayah dalam rangka Implementasi Transformasi Kesehatan	Pusat	7 Daerah (Prov/Kab/Kota)		
<b>Sasaran Kegiatan:Meningkatnya jumlah populasi yang berpartisipasi dalam penyimpanan dan pengambilan sampel Biobank</b>					
	IKK 31.1.1 Persentase populasi direkrut untuk penyimpanan biobank		97%		Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan - Direktorat Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan
	Output: 2090.AEF.101 Advokasi dan sosialisasi pengembangan pelayanan kesehatan rujukan	Pusat	19.200 orang		
	Output: AFA.101 Pedoman Penyelenggaraan Pemanfaatan Teknologi Biomedis	Pusat	3 Pedoman		
-	IKK 31.1.2 Persentase populasi yang menggunakan farmakogenomik		60%		Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan - Direktorat Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan
	Output: 2090.PFA.101 Pedoman Pelayanan Kedokteran Presisi	Pusat	1 NSPK		
	Output: 2090.QDB.103 Pendampingan Teknis dan Supervisi RS Penyelenggara Kedokteran Presisi	Pusat	10 Lembaga		
	Output: 2090. BDB.101 Pendampingan teknis dan supervisi RS dalam pengembangan sel punca	Pusat	8 Lembaga		
	Output: 2090. ACD.101 Penilaian kesesuaian perizinan dan penetapan terkait biomedis dalam kewenangan pusat	Pusat	9 institusi		
	Output: 2090. AFA.102 Pedoman Standar Usaha Pengelolaan dan Penyimpanan Sel/Sel Punca	Pusat	2 Pedoman		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2025	
	Output: 2090. BDB.103 Implementasi Pengolahan dan Penyimpanan Sel/ Sel Punca di Bank dan Lab sesuai standar	Pusat	4 Lembaga		
	Output: 2090.AFA.104 Pedoman standar usaha penyelenggaraan bank mata	Pusat	1 pedoman		
	Output: 2090.FAE.103 Pemantauan Fasilitas pelayanan kesehatan yang Mengembangkan Pelayan Rujukan Berbasis Terapi Sesuai Standar		5 laporan		
	Output: 2090. BDB.102 Implementasi pelayanan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Pusat	4 lembaga		
<b>Sasaran Kegiatan: Meningkatnya RS yang melakukan Penelitian Kesehatan</b>					
	IKK 32.2.1 Pertumbuhan RS yang sudah memiliki CRU sesuai Standar		43 RS		Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan - Direktorat Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan
	Output: 2090.QDB.107 Pendampingan dan Pembinaan CRU Rumah Sakit	Provinsi DKI Jakarta	3 RS		
	Output : 2090.QDB.102 Layanan Komisi Etik Penelitian Kesehatan Nasional	Pusat	3 Lembaga		
	Output : 2090.QDB.104 Pendampingan Teknis dan Supervisi RS Penyelenggara Penelitian Klinik	Pusat	8 Lembaga		
	IKK 32.2.2 Jumlah peneliti di CRU RS yang tersertifikasi GCP		100 Peneliti		Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan - Direktorat Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan
	Output: 2090.SCM.101 Pelatihan <i>good clinical practice</i> untuk peningkatan CRU Rumah Sakit	Provinsi DKI Jakarta	100 orang		
<b>5836. Kegiatan Pembinaan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan</b>				<b>23.797</b>	
<b>Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Lanjutan</b>					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2025	
	IKK 16.4.1 Persentase RS yang mencapai target INM (Indikator Nasional Mutu)		8%		Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan - Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan
	Output: 5836.AEF.001 Sosialisasi Budaya Mutu dan Keselamatan Pasien di Fasilitas Kesehatan	Pusat	20.400 orang		
	Output: 5836.AEF.002 Sosialisasi terkait pemenuhan persyaratan dan penyelenggaraa perizinan	Pusat	100 orang		
	Output: 5836.AEF.003 Workshop pelaksanaan perizinan bagi verifikator perizinan FKTL	Pusat	100 orang		
	Output: 5836.AEF.004 Pertemuan Binwas dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Lanjutan dan Perizinan Kesehatan Rujukan	Pusat	120 orang		
	Output: 5836.AFA.002 Pedoman Pembinaan, Pengawasan, dan Pengelolaan Pengaduan	Pusat	2 pedoman		
	Output: 5836.AFA.007 Penyusunan Pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pada Kegiatan Usaha Pelayanan Kesehatan	Pusat	1 Pedoman		
	Output: 5836.BDB.001 Institusi Pendidikan Yang Berkomitmen Mendukung Rumah Sakit Membangun Budaya Keselamatan Pasien Menuju Zero Harm	Pusat	2 lembaga		
	Output: 5836.BDB.005 Peningkatan Fasilitas Kesehatan melalui Evaluasi dan Pembinaan	Pusat	45 lembaga		
	Output: 5836.BDB.006 Penyusunan Dashboard Profil Perizinan Berusaha	Pusat	50 lembaga		
	Output: 5836.BKC.001 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Keselamatan Pasien di Rumah Sakit	Pusat	29 lembaga		
	Output: 5836.PBG.001 Peningkatan Kepatuhan terhadap standar Pelayanan kesehatan Rumah Sakit dan Unit Pengelola Darah Melalui Pelaporan Indikator Nasional Mutu dan Insiden Keselamatan Pasien	Pusat	3 rekomendasi kebijakan		
	Output: 5836.PDE.001 Rumah Sakit Pemerintah Terakreditasi Paripurna	Pusat	46 lembaga		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2025	
	Output: 5836.PFA.001 Penyusunan Standar Akreditasi Rumah Sakit Kapal	Pusat	1 Standar		
	Output: 5836.PFA.005 Penyusunan Revisi Standar Akreditasi Unit Pelayanan Darah	Pusat	1 Standar		
	Output: 5836.PFA.006 Penyusunan Strategi Nasional Keselamatan Pasien	Pusat	1 Pedoman		
	Output: 5836.QDB.001 Penerapan Survei Budaya Keselamatan Pasien di Rumah Sakit dan Unit Pelayanan Darah	Pusat	39 lembaga		
	IKK 16.4.2 Persentase Klinik Utama yang mencapai target Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan yang ditentukan		8%		Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan - Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan
	Output: 5836.AFA.003 Revisi Standar Akreditasi Klinik utama dan Laboratorium Klinik	Pusat	6 Pedoman		
	Output: 5836.BDB.003 Laboratorium Klinik dan Klinik Utama yang Menerapkan Budaya Mutu Keselamatan Pasien	Pusat	40 lembaga		
	Output: 5836.BKC.002 Pemantauan Mutu laboratorium klinik dan Klinik utama	Pusat	8 lembaga		
	Output: 5836.AFA.003 Revisi Standar Akreditasi Klinik utama dan Laboratorium Klinik	Pusat	6 Pedoman		
<b>Sasaran Kegiatan: Rumah Sakit pemerintah yang melaporkan implementasi Program Pengendalian Resistansi Antimikroba (PPRA) kepada Kementerian Kesehatan melalui aplikasi sistem informasi Rumah Sakit</b>					
	IKK 16.6.1 Persentase Rumah Sakit yang mengimplementasikan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA)		30%		Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan - Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan
	Output: 5836.AEF.005 Sosialisasi pelaporan SIRS Online	Pusat	100 orang		
	Output: 5836.AFA.004 Pedoman antimikroba	Pusat	2 pedoman		
	Output: 5836.BDB.002 Pemantauan penggunaan antibiotik dan PGA	Pusat	8 lembaga		
	Output: 5836.BDB.004 Pembinaan pelaksanaan AMR dan PPI	Pusat	20 lembaga		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2025	
	Output: 5836.QDB.002 Peningkatan mutu SDM Dinkes untuk pengawasan resistensi antimikroba dan PPI	Pusat	38 lembaga		
	Output: 5836.QDB.003 Pembinaan Fasilitas pelayanan kesehatan dalam mengimplementasikan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba	Pusat	30 lembaga		
<b>6388. Kegiatan Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan</b>				<b>17.173.157</b>	
<b>Sasaran Kegiatan: Menguatnya tata kelola pelayanan UPT Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan</b>					
	IKK 14.1.5 Jumlah UPT Vertikal yang ditingkatkan sarana, prasarana dan alkesnya		39 UPT		Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan - Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan
	Output: 6388.ABG.001 Rekomendasi Kebijakan Pengembangan RS di Bidang Klinis [Rekomendasi Kebijakan]	Daerah	84 kajian		
	Output: 6388.BAH.001 Pelayanan Publik Lainnya	Daerah	1 layanan		
	Output: 6388.BEJ.001 Bantuan Pendidikan SDM Kesehatan	Daerah	237 orang		
	Output: 6388.CAB.002 Alat Kesehatan	Daerah	5816 unit		
	Output: 6388.CAB.003 Obat-obatan dan BMHP	Daerah	368 Paket		
	Output: 6388.CAB.004 Ambulans/Mobil Jenazah (LR)	Daerah	2 paket		
	Output: 6388.CAN.001 Perangkat Pengolah Data dan Informasi (LR)	Daerah	5004 unit		
	Output: 6388.CAN.002 Software/ antivirus UPT Vertikal (LR)	Daerah	142 unit		
	Output: 6388.CAN.003 Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (LR)	Daerah	2134 unit		
	Output: 6388.CBR.001 Dukungan Teknis (LR-12)	Daerah	4 dokumen		
	Output: 6388.CBV.001 Pembangunan Gedung Layanan	Daerah	14 Paket		
	Output: 6388.CBV.002 Renovasi Gedung Layanan	Daerah	2.175 Paket		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2025	
	Output: 6388.CBV.004 Alat Non Medik - LR	Daerah	6.354 unit		
	Output: 6388.CCB.001 Operasional dan Pemeliharaan UPT BLU	Daerah	34 Paket		
	Output: 6388.CCB.002 Operasional dan Pemeliharaan UPT Non BLU	Daerah	5 Paket		
	Output: 6388.CCL.001 Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Komputer UPT BLU (LR-12)	Daerah	18 unit		
	Output: 6388.DCM.002 Pelatihan Bidang Kesehatan (LR)	Daerah	19.421 orang		
	Output: 6388.EBA.962 Layanan Umum	Daerah	35 layanan		
	Output: 6388.EBB.951 Layanan Sarana Internal	Daerah	1.743 unit		
	Output: 6388.EBC.001 Layanan Kepegawaian Satker UPT Vertikal	Daerah	19.180 orang		
	Output: 6388.FAE.001 Layanan Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan di UPT Vertikal (LR)	Daerah	22 laporan		
	Output: 6388.PBG.001 Rekomendasi Kebijakan Pengembangan RS di Bidang Klinis Pelayanan KIA (IsDB) - LR	Daerah	6 rekomendasi kebijakan		
	Output: 6388.PBG.002 Rekomendasi Kebijakan Pengembangan RS dalam meningkatkan sistem rujukan pelayanan KIA (IsDB) - LR	Daerah	6 rekomendasi kebijakan		
	Output: 6388.PBG.003 Buku, Jurnal serta Inovasi (IsDB) Pelayanan KIA - LR	Daerah	6 kajian		
	Output: 6388.PBG.004 Rekomendasi Kebijakan Pengembangan RS di Bidang Klinis Pelayanan Kanker Terpadu (IsDB) - LR	Daerah	4 rekomendasi kebijakan		
	Output: 6388.PBG.005 Rekomendasi Kebijakan Pengembangan RS dalam meningkatkan sistem rujukan Pelayanan Kanker Terpadu (IsDB) (LR-12)	Daerah	1 rekomendasi kebijakan		
	Output: 6388.PBG.006 Buku, Jurnal serta Inovasi (IsDB) Pelayanan Kanker Terpadu - LR	Daerah	1 kajian		
	Output: 6388.QDB.001 Fasilitasi Pengelolaan Manajemen Proyek Penguatan Pelayanan Kesehatan	Daerah	15 unit kerja		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2025	
	Ibu dan Anak (IsDB)				
	Output: 6388.QDB.002 Fasilitasi Pengelolaan Manajemen Proyek Penguatan Pusat Pelayanan Kanker Terpadu (IsDB) - LR	Daerah	6 unit kerja		
	Output: 6388.RAB.003 Alat Kesehatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (IsDB) - LR	Daerah	6 paket		
	Output: 6388.RAB.004 Alat Kesehatan Pelayanan Kanker Terpadu (IsDB) (LR-12)	Daerah	4 Paket		
	Output: 6388.RAB.005 Reagen dan BHP Hubs BGSi	Daerah	22 paket		
	Output: 6388.RBV.001 Alat Non Medik (IsDB) - LR	Daerah	295 unit		
	Output: 6388.RBV.003 Gedung Pelayanan Kesehatan Kanker Terpadu (IsDB) - LR	Daerah	4 Paket		
	Output: 6388.RBV.004 Alat Non Medis BGSi	Daerah	89 unit		
	Output: 6388.RCB.001 Operasional BGSi	Daerah	2 paket		
	Output: 6388.RCL.001 Pemeliharaan Jaringan BGSi	Daerah	1.112 unit		
	Output: 6388.SCM.001 Pelatihan Keterampilan dan Kompetensi Lainnya pada Proyek Penguatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (IsDB)	Daerah	2.278 orang		
	Output: 6388.SCM.002 Pelaksanaan Pendidikan Formal Tenaga RS pada Proyek Penguatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (IsDB)	Daerah	186 orang		
	Output: 6388.SCM.003 Pelatihan Keterampilan dan Kompetensi Lainnya pada Proyek Penguatan Pelayanan Kanker Terpadu (IsDB) - LR	Daerah	341 orang		
	Output: 6388.SCM.004 Pelaksanaan Pendidikan Formal Tenaga RS pada Proyek Penguatan Pelayanan Kanker Terpadu (IsDB)	Daerah	104 orang		
	Output: 6388.UAE.001 Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Pelaksanaan Proyek IsDB - LR	Daerah	3 laporan		
	Output: 6388.UAE.002 Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Pelaksanaan Proyek IsDB Penguatan Pelayanan Pusat Kanker Terpadu - LR	Daerah	4 laporan		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2025	
<b>6807 Kegiatan Pembinaan Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan</b>				<b>345.288</b>	
	<b>Sasaran Kegiatan: Menguatnya Tata Kelola Rumah Sakit</b>				
	IKK 16.3.2 Jumlah RS yang menyelenggarakan pendidikan spesialis dan/atau sub spesialis berbasis RS		10 RS		Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan - Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan
	Output: 6807.AFA.004 NSPK RS Pendidikan (LR-11)	Pusat	1 NSPK		
	Output: 6807.BDB.001-Pembinaan dan Fasilitasi di RS Pendidikan (LR-11)	Pusat	100 Lembaga		
	Output: 6807.QDB.011-Rumah Sakit Penyelenggara Pendidikan Utama sebagai Penyelenggaraan Program PPDS	Pusat	10 Lembaga		
	Output: 6807.RAB.001 Sarana Kesehatan Penunjang Pendidikan Dokter Spesialis dan Subspesialis (LR-11)	Pusat	1 Paket		
	IKK 16.3.5 Jumlah RS yang mengembangkan layanan unggulan/ <i>center of excellence</i> melalui kerja sama dengan RS atau Institusi Kesehatan Luar Negeri		68 RS		Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan - Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan
	Output: 6807.AFA.003 Pedoman Program Sister Hospital RS dengan Luar Negeri (LR-11)	Pusat	1 NSPK		
	Output: 6807.BDB.005-Program Sister Hospital dengan RS Luar Negeri	Pusat	10 Lembaga		
	Output: 6807.BDB.025-Pengembangan kerja sama RS dengan mitra luar negeri	Pusat	20 Lembaga		
	IKK 16.4.4 Jumlah RS Pemerintah yang Memenuhi Tingkat Maturitas Kemandirian		5 RS		Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan - Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan
	Output: 6807.AEF.001 Sosialisasi dan Advokasi Tata Kelola Pelayanan Kesehatan	Pusat	22.200 orang		
	Output: 6807.AFA.005 NSPK Modul Penyusunan Tarif RS (LR-12)	Pusat	1 NSPK		
	Output: 6807.BDB.027 Pembinaan RS Terkait Penghitungan Unit Cost di RS	Pusat	18 Lembaga		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2025	
	Output: 6807.PFA.003 NSPK Pedoman Penyelenggaraan Operasional BLU RS Pemerintah (LR-12)	Pusat	1 NSPK		
	Output: 6807.PFA.005 Pedoman Instrumen Monitoring Kinerja Keuangan dan Operasional BLU RS Pemerintah (LR-12)	Pusat	1 NSPK		
	Output: 6807.QDB.008 Pembinaan BLU RS Pemerintah yang Mandiri (LR-12)	Pusat	50 Lembaga		
	IKK 16.4.5 Persentase Rumah Sakit memberikan layanan ramah penyandang disabilitas		40%		Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan - Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan
	Output : 6807.QDB.313-RS BLU Kemenkes, RS BLUD, dan RS BLU TNI/POLRI yang memiliki kinerja pelayanan baik	Pusat	40 Lembaga		
	IKK 17.2.1 Jumlah RS BLU dan BLUD yang sudah memiliki ketepatan waktu visit dokter pelayanan rawat inap		450 RS		Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan - Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan
	Output: 6807.BDB.028 Penyelesaian Klaim Pelayanan Tertentu (LR-12)	Pusat	15 Lembaga		
	Output : 6807.QDB.002 RS menerapkan rekam medis elektronik	Pusat	481 Lembaga		
	Output: 6807.QDB.012 Rumah Sakit Vertikal yang tata kelola dan pelayanannya setara World Class Hospital	Pusat	37 Lembaga		
	IKK 17.2.2 Jumlah RS BLU dan BLUD yang sudah memiliki ketepatan waktu pelayanan rawat jalan		450 RS		Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan - Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan
	Output: 6807.BDB.026 Rumah sakit yang diberikan pembinaan pembiayaan kesehatan dan jaminan kesehatan	Pusat	36 Lembaga		
	Output: 6807.BDB.002 Pembinaan Implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) JKN	Pusat	1354 Lembaga		
<b>024.WA Program Dukungan Manajemen</b>				<b>3.143.769</b>	
<b>4813. Kegiatan Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di</b>				<b>3.143.769</b>	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2025	
<b>Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan</b>					
<b>Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya</b>					
	IKK 33.1.4 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan		77 (Nilai)		Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan
	Output: 4813.AAH.001 Peraturan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan	Pusat	10 Peraturan		
	Output: 4813.BIF.001 Layanan Pengawasan dan Pengendalian Internal Ditjen Yankes	Pusat	1 Layanan		
	Output: 4813.EBA.956.Layanan BMN	Pusat	1 Layanan		
	Output: 4813.EBA.957.Layanan Hukum	Pusat	1 Layanan		
	Output: 4813.EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Pusat	1 Layanan		
	Output: 4813.EBA.962.Layanan Umum	Pusat	6 Layanan		
	Output: 4813.EBA.963 Layanan Data dan Informasi	Pusat	1 Layanan		
	Output: 4813.EBA.994.Layanan Perkantoran	Pusat dan Daerah	26 Layanan		
	IKK 33.2.4 Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan		92,35 (Nilai)		Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan
	Output 4813.EBD.952 Layanan Perencanaan dan Panganggaran	Pusat	1 Layanan		
	Output: 4813.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Pusat	1 Layanan		
	Output 4813.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	Pusat	1 Layanan		
	Output 4813.FAD.001 Perencanaan dan Panganggaran Program Transfer Daerah	Pusat	1 Layanan		
	Output: 4813.QDB.001 Fasilitasi Pengelolaan Proyek Penguatan RS Rujukan Nasional dan UPT Vertikal (IsDB) (LR)	Pusat	1 Layanan		
	Output 4813.QDB.002 Fasilitasi Pengelolaan Proyek Penguatan Pusat Layanan Kanker Terpadu UPT	Pusat	1 Layanan		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2025	
	Vertikal (IsDB) (LR)				
	Output 4813.QDB.003 Fasilitasi Pengelolaan Proyek Penguatan RS Layanan KJSU (SIHREN)	Pusat	1 Layanan		
	IKK 33.3.4 Indeks kualitas SDM Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan		81 (Nilai)		Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan
	Output: 4813.EBC.954 Layanan Manajemen SDM	Pusat	2.945 orang		
	IKK 33.4.14 Nilai maturitas manajemen risiko Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan		3,95 (Nilai)		Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan
	Output: 4813. EBA.960. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Pusat	1 Layanan		
	IKK 33.4.22 Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan		95%		Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan
	Output: 4813. EBA.960. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Pusat	1 Layanan		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	
<b>PROGRAM KESEHATAN LANJUTAN</b>											
							38.243.931	34.058.177	32.723.350	33.881.055	
<b>Sasaran Strategis: 2.1 Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan primer, lanjutan dan labkes</b>											
	ISS 14: Persentase Kab/Kota dengan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar		65%	70%	75%	80%					Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kontributor:

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	
											Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan
	ISS 16: Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi paripurna		36,5%	44%	62,5%	75,5%					Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan  Kontributor: Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas
	ISS 17: Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan		78 (Nilai)	79 (Nilai)	79,5 (Nilai)	80 (Nilai)					Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan  Kontributor: Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas
<b>Sasaran Strategis: 5.1 Meningkatnya kualitas ekosistem teknologi kesehatan dan uji klinis</b>											
	ISS 31: Pertumbuhan layanan kesehatan berbasis kedokteran presisi yang diimplementasikan		200%	300%	400%	500%					Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	
024.DY Program Pelayanan Kesehatan Lanjutan							33. 99 5.0 23	29.602.426	28.113.278	29.041.720	
	<b>Sasaran Program: Meningkatnya kualitas layanan obstetrik di RS</b>										
	IKP 1.4 Persentase Kab/kota dengan CFR <i>direct obstetric</i> (eklampsia & pendarahan postpartum) < 1%		35%	55%	70%	80%					Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan
	<b>Sasaran Program: Meningkatnya pemerataan akses dan mutu pelayanan kesehatan lanjutan</b>										
	IKP 14.1 Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan dengan SPA kesehatan sesuai standar		60%	70%	75%	80%					Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan
	IKP 14.2 Rasio tempat tidur (TT) terhadap populasi		1,6 per 1.000 penduduk	1,75 per 1.000 penduduk	1,87 per 1.000 penduduk	2 per 1.000 pendudu k					Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan
	IKP 16.3 Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan yang memenuhi		55%	60%	65%	70%					Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Organisasi Pelaksana
			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	
	standar pelayanan kesehatan berkualitas									
	IKP 16.4 Persentase rumah sakit pemerintah terakreditasi paripurna		45%	60%	75%	85%				Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan
	IKP 16.5 Persentase kab/kota yang memiliki RS dengan kompetensi untuk menangani 10 penyakit prioritas		40%	60%	80%	100%				Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan
	IKP 16.6 Persentase RS Pemerintah yang patuh memberikan antibiotik sistemik empirik sesuai standar		15%	30%	45%	60%				Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan
	IKP 16.7 Persentase Kab/kota yang memiliki RS dengan layanan trauma center		20%	40%	60%	87%				Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan
	IKP 17.2 Tingkat kepuasan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan		78	79	79,5	80				Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan
	<b>Sasaran Program: meningkatkan layanan berbasis kedokteran presisi</b>									
	IKP 31.1 Jumlah layanan berbasis kedokteran presisi		7 Layanan	10 Layanan	13 Layanan	15 Layanan				Direktorat Jenderal

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	
											Kesehatan Lanjutan
	<b>Sasaran Program: meningkatnya kapabilitas riset di RS</b>										
	IKP 32.2 Pertumbuhan RS yang sudah menerapkan hasil riset translasional		25 RS	50 RS	100 RS	174 RS					Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan
	IKP 32.3 Jumlah CRU yang sudah memenuhi standar GCP		6 RS	9 RS	12 RS	15 RS					Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan
<b>7957. Kegiatan Peningkata n Pelayanan Kesehatan Lanjutan</b>							<b>9.4 24. 37 1</b>	<b>4.894.350</b>	<b>3.197.238</b>	<b>3.197.153</b>	
	<b>Sasaran Kegiatan: Meningkatnya persentase Kab/Kota yang memiliki RS ponek sesuai standar</b>										
	IKK 1.4.1 Persentase Kab/Kota dengan RS PONEK sesuai standar		35%	50%	65%	85%					Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan - Direktorat Pelayanan Klinis

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	
	Output: 7957.QDB.001- Pembinaan RS PONEK serta Operasi Sectio Caesarea Darurat dalam Waktu Kurang Atau Sama Dengan 30 Menit	Pusat	620 RS	670 RS	720 RS	770 RS					
	Output: 7957.ABG.001 Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK)	Pusat	10 rekomend asi kebijakan	10 rekomend asi kebijakan	10 rekomend asi kebijakan	10 rekomend asi kebijaka n					
	<b>Sasaran Kegiatan: Kab/Kota dengan RSUD kelas D yang ditingkatkan menjadi kelas C</b>										
	IKK 14.1.1 Kab/Kota dengan RSUD tipe D yang ditingkatkan menjadi tipe C		32 Kab/Kota (kum)	49 Kab/Kota (kum)	66 Kab/Kota (kum)	66 Kab/Kot a (kum)					Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan - Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan
	Output: 7957.QEO.401 Pembangunan Peningkatan RS Berkualitas di Kab/Kota (Pemenuhan PHTC bidang kesehatan)	Pusat	34 Paket	10 Paket	-	-					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	
	Output: 7957.AEA.404 Koordinasi Pelaksanaan Quick Win / PHTC Peningkatan RSUD berkualitas dari kelas D/ D Pratama	Pusat	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan					
	Output: 7957.UAE.415 Monitoring Program Quick Win/PHTC Peningkatan RSUD Berkualitas dari Kelas D/D Pratama Menjadi Strata Madya	Pusat	34 laporan	10 Laporan							
	Output: 7957.UAE.416 Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan RSUD/PHTC Peningkatan RSUD berkualitas dari Kelas D/D Pratama menjadi Strata Madya	Pusat	34 Laporan	10 Laporan							
	Output: 7957.UAE.418 Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) RSUD bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK)	Pusat	30 Laporan	30 Laporan	30 Laporan	30 Laporan					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	
	<b>Sasaran Kegiatan: RS Kab/Kota yang telah memenuhi standar ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standar</b>										
	IKK 14.1.2 Persentase RS Pemerintah Daerah yang memenuhi Ketersediaan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standar		60%	70%	75%	80%					Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan - Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan
	Output: 7957.AEA.403 Koordinasi penilaian teknologi dan perencanaan kebutuhan serta pemantauan perizinan SPA program Quickwin	Pusat	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan					
	Output: 7957.AEF.001 Sosialisasi kualitas fasilitas kesehatan terhadap pelayanan masyarakat	Pusat	9600 orang	9600 orang	9600 orang	9600 orang					
	Output: 7957.AFA.001 Revisi PMK 40 tahun 2022 terkait Bangunan dan Prasarana di RS	Pusat	3 NSPK	3 NSPK	3 NSPK	3 NSPK					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	
	Output: 7957.PEF.403 Sosialisasi dan diseminasi bidang alkes RS yang ditetapkan sebagai jejaring penyakit prioritas nasional	Pusat	250 orang	150 orang	150 orang	150 orang					
	Output: 7957.PFA.403 Pedoman dalam rangka pemenuhan SP Fasilitas pelayanan kesehatan Lainnya	Pusat	1 NSPK	1 NSPK	1 NSPK	1 NSPK					
	Output: 7957.PFA.404 Pedoman Pemenuhan Alat Kesehatan Fasilitas pelayanan kesehatan Rujukan untuk Pelayanan 9 penyakit Prioritas sesuai standar	Pusat	3 NSPK	2 NSPK	2 NSPK	2 NSPK					
	Output: 7957.QDB.405 RS yang diberikan bimbingan teknis ASPAK untuk ketersediaan sarana prasarana dan alat kesehatan	Pusat	366 Lembaga	561 Lembaga	765 Lembaga	974 Lembaga					
	Output: 7957.RAB.409 Pengadaan peralatan Kesehatan dan pendukungnya untuk Rumah Sakit (SIHREN)	Pusat	7974 Unit	7974 Unit							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	
	Output: 7957.UAE.411 Monitoring Pemanfaatan Bantuan Alat Kesehatan dan Penunjang BMN SIHREN	Pusat	11 Laporan	12 Laporan							
	Output: 7957.UAE.413 RS Pemerintah Daerah yang dilakukan Monitoring dan Evaluasi SPA pada ASPAK	Pusat	15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan					
	Output: 7957.UAE.414 Pemantauan Pemanfaatan dan Pemeliharaan Alkes Anggaran SIHREN	Pusat	260 Laporan	260 Laporan							
	Output: 7957.UAE.417 Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Wilayah Transformasi Kesehatan di Direktorat Fasilitas pelayanan kesehatan Rujukan	Pusat	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan					
	<b>Sasaran Kegiatan: UPD milik pemerintah dengan SPA sesuai standar</b>										
	IKK 14.1.3 Persentase UPD milik pemerintah dengan SPA sesuai standar		60%	70%	75%	80%					Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan - Direktorat

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	
											Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan
	Output: 7957.QDB.413 Pembinaan teknis pemenuhan dan pengembangan sarana prasarana dan alat kesehatan UPD	Pusat	80 Lembaga	88 Lembaga	97 Lembaga	107 Lembaga					
	Output: 7957.UAE.404 Sarana Prasarana dan Alat UPD yang dilakukan monitoring dan evaluasi	Pusat	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan					
	Output: 7957.QDB.414 Pembinaan Teknis Pemenuhan dan Pengembangan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan di Fasilitas pelayanan kesehatan Lainnya	Pusat	15 Lembaga	20 Lembaga	25 Lembaga	30 Lembaga					
	<b>Sasaran kegiatan : meningkatkan Kab/Kota yang memenuhi Standar Kebutuhan Darah di wilayahnya</b>										
	IKK 14.1.4 Persentase Kab/Kota Memenuhi Standar Kebutuhan Darah di wilayahnya		35%	55%	75%	95%					Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan - Direktorat



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	
	<b>memenuhi rasio TT minimal 2:1000</b>										
	IKK 14.2.1 Jumlah kab/kota yang memenuhi rasio tempat tidur (TT) minimal 2:1000		143 Kab/Kota	162 Kab/Kota	181 Kab/Kota	200 Kab/Kota					Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan - Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan
	Output: 7957.QDB.410 Pemenuhan Indikator Rasio Jumlah TT/Populasi 2:1000 di Kab/Kota	Pusat	18 Lembaga	18 Lembaga	18 Lembaga	18 Lembaga					
	<b>Sasaran Kegiatan: Meningkatnya RS yang melakukan pengembangan pelayanan kesehatan lanjutan</b>										
	IKK 16.3.1 Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan telemedicine		450 Fasilitas pelayanan kesehatan	500 Fasilitas pelayanan kesehatan	550 Fasilitas pelayanan kesehatan	600 Fasilitas pelayanan kesehatan					Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan - Direktorat Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan
	Output: 7957.QDB.101-Bimbingan Teknis dan	Pusat	115 Lembaga	115 Lembaga	115 Lembaga	115 Lembaga					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	
	Supervisi Terkait Pengembangan Pelayanan Telemedisin										
	Output: 7957.UAB.101 Pengembangan Sistem Aplikasi Telemedisin	Pusat	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem					
	Output: 7957.AFA.115 - NSPK Penyelenggaraan Pelayanan Telemedisin	Pusat	1 NSPK	1 NSPK	1 NSPK	1 NSPK					
	Output: 7957.BIC.101. Bimbingan Teknis dan Supervisi Terkait Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Dengan Bantuan	Pusat	60 Lembaga	60 Lembaga	60 Lembaga	60 Lembaga					
	Output: 7957.FAE.102. Bimbingan Teknis dan Supervisi Terkait Pengembangan Pelayanan Berbasis Teknologi Kesehatan Lainnya	Pusat	45 Laporan	45 Laporan	45 Laporan	45 Laporan					
	Output: 7957.FAE.101. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pelayanan Berbasis Teknologi Informasi dan Teknologi Kesehatan Lainnya	Pusat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan					
	Output: 7957.BDB.107.	Pusat	8 Lembaga	8 Lembaga	8 Lembaga	8 Lembaga					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	
	Fasilitasi RS Penyelenggara Pengembangan Bedah Robotik										
	Output: 7957.AFA.119. NSPK Penyelenggaraan Pelayanan Robotik Kesehatan	Pusat	1 NSPK	1 NSPK	1 NSPK	1 NSPK					
	IKK 16.3.6 Jumlah RS yang siap dan mendukung pelayanan wisata medis		34 RS	38 RS	42 RS	45 RS					Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan - Direktorat Pengembang an Pelayanan Kesehatan Rujukan
	Output: 7957. AFA.116 - Pedoman Penyelenggaraan Perizinan serta Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Pusat Diagnostik	Pusat	1 NSPK	1 NSPK	1 NSPK	1 NSPK					
	Output: 7957. AFA.117 - Pedoman Penyelenggaraan Linen di Rumah Sakit	Pusat	1 NSPK	1 NSPK	1 NSPK	1 NSPK					
	Output: 7957. AFA.118 - Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Sterilisasi	Pusat	1 NSPK	1 NSPK	1 NSPK	1 NSPK					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	
	Sentral di Rumah Sakit										
	Output: 7957. FAE.105 - Monitoring dan Evaluasi Penunjang Pelayanan Kesehatan Lanjutan	Pusat	15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan					
	Output: 7957. AEA.101 - Pelayanan Kesehatan yang Terstandar pada Event Nasional dan Internasional	Pusat	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan					
	Output: 7957. AEA.102 - Fasilitasi Pengembangan Program Penunjang Pelayanan Kesehatan Lanjutan	Pusat	8 Kegiatan	8 Kegiatan	8 Kegiatan	8 Kegiatan					
	Output: 7957. BDB.110 - Fasilitasi Perizinan Pelayanan Pusat Diagnostik	Pusat	8 Lembaga	8 Lembaga	8 Lembaga	8 Lembaga					
	Output: 7957. QDB.105 - Fasilitasi dan Pembinaan Rumah Sakit Penyelenggara Pelayanan Wisata Medis sesuai Standar	Pusat	28 Lembaga	28 Lembaga	28 Lembaga	28 Lembaga					
	Output: 7957. AEF.102 - Workshop Program Penunjang	Pusat	150 Orang	150 Orang	150 Orang	150 Orang					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Organisasi Pelaksana
			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	
	Pelayanan Kesehatan Lanjutan									
	Output: 7957. AFA.110 - NSPK Transplantasi Organ dan/atau Jaringan	Pusat	1 NSPK	1 NSPK	1 NSPK	1 NSPK				
	Output: 7957. BDB.104 - Pembinaan Fasilitas pelayanan kesehatan dalam Penyelenggaraan Layanan Transplantasi Organ dan/atau Jaringan Tubuh	Pusat	20 Lembaga	20 Lembaga	20 Lembaga	20 Lembaga				
	Output: 7957. FBA.101 - Pembinaan Wilayah dalam rangka Implementasi Transformasi Kesehatan	Pusat	7 Daerah (Prov/Kab /Kota)	7 Daerah (Prov/Kab /Kota)	7 Daerah (Prov/Kab /Kota)	7 Daerah (Prov/Kab /Kota)				
	<b>Sasaran Kegiatan: Menguatnya Tata Kelola Rumah Sakit</b>									
	IKK 16.3.2 Jumlah RS yang menyelenggarakan Pendidikan spesialis dan / atau sub spesialis berbasis RS		15 RS	25 RS	35 RS	45 RS				Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan - Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	
	Output: 7957.BDB.301-RS Pendidikan sesuai Standar RS Pendidikan	Pusat	100 Lembaga	100 Lembaga	100 Lembaga	100 Lembaga					
	Output: 7957.QDB.311-Rumah Sakit Penyelenggara Pendidikan Utama sebagai Penyelenggaraan Program PPDS	Pusat	10 Lembaga	10 Lembaga	10 Lembaga	10 Lembaga					
	Output:7957.AFA.304- NSPK RS Pendidikan	Pusat	1 NSPK	1 NSPK	1 NSPK	1 NSPK					
	IKK 16.3.5 Jumlah RS yang mengembangkan layanan unggulan/ <i>center of excellence</i> melalui kerja sama dengan RS atau Institusi Kesehatan Luar Negeri		76 RS	84 RS	92 RS	100 RS					Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan - Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan
	Output: 7957.AFA.303- Pedoman Program Sister Hospital RS dengan Luar Negeri	Pusat	1 NSPK	1 NSPK	1 NSPK	1 NSPK					
	Output: 7957.BDB.305- Program Sister Hospital dengan RS Luar Negeri	Pusat	10 Lembaga	10 Lembaga	10 Lembaga	10 Lembaga					
	Output: 7957.BDB.325-	Pusat	20 Lembaga	20 Lembaga	20 Lembaga	20 Lembaga					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	
	Pengembangan kerja sama RS dengan mitra luar negeri										
	IKK 16.4.4 Jumlah RS Pemerintah yang Memenuhi Tingkat Maturitas Kemandirian		10 RS	20 RS	25 RS	30 RS					Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan - Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan
	Output: 7957.AEF.301- Sosialisasi dan Advokasi Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan	Pusat	22200 orang	22200	22200	22200					
	Output: 7957.AFA.305- NSPK Modul Penyusunan Tarif RS	Pusat	1 NSPK	1 NSPK	1 NSPK	1 NSPK					
	Output:7957.BDB.327- Pembinaan RS Terkait Penghitungan Unit Cost di RS	Pusat	18 Lembaga	18	18	18					
	Output : 7957.PFA.303- Pedoman Penyelenggaraan Operasional BLU RS Pemerintah	Pusat	1 NSPK	1 NSPK	1 NSPK	1 NSPK					
	Output: 7957.QDB.308-BLU RS Pemerintah yang	Pusat	50 Lembaga	50 Lembaga	50 Lembaga	50 Lembaga					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	
	ditingkatkan kemandiriannya										
	IKK 16.4.5 Persentase Rumah Sakit memberikan layanan ramah penyandang disabilitas		50%	60%	70%	80%					Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan - Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan
	Output: 7957. QDB.315-Rumah Sakit yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ramah Penyandang Disabilitas	Pusat	321 Lembaga	321 Lembaga	321 Lembaga	321 Lembaga					
	IKK 17.2.1 Jumlah RS BLU dan BLUD yang sudah memiliki ketepatan waktu visit dokter pelayanan rawat inap		500 RS	550 RS	600 RS	650 RS					Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan - Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan
	Output : 7957.BDB.328- Penyelesaian Klaim Pelayanan Tertentu	Pusat	15 Lembaga	15 Lembaga	15 Lembaga	15 Lembaga					
	Output : 7957.QDB.302-RS menerapkan rekam medis elektronik	Pusat	481 Lembaga	481 Lembaga	481 Lembaga	481 Lembaga					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	
	Output: 7957.QDB.313-RS BLU Kemenkes, RS BLUD, dan RS BLU TNI/POLRI yang memiliki Kinerja Pelayanan Baik	Pusat	40 Lembaga	40 Lembaga	40 Lembaga	40 Lembaga					
	IKK 17.2.2 Jumlah RS BLU dan BLUD yang sudah memiliki ketepatan waktu pelayanan rawat jalan		500 RS	550 RS	600 RS	650 RS					Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan - Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan
	Output: 7957.BDB.302- Pembinaan implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) JKN	Pusat	3.057 Lembaga	3.057 Lembaga	3.057 Lembaga	3.057 Lembaga					
	Output: 7957.BDB.326-Rumah sakit yang diberikan pembinaan Pendanaan kesehatan dan jaminan kesehatan	Pusat	36 Lembaga	36 Lembaga	36 Lembaga	36 Lembaga					
	Output: 7957.QDB.314-Rumah Sakit Vertikal yang Mengembangkan Pusat Layanan Unggulan (Center of Excellence)	Pusat	39 Lembaga	39 Lembaga	39 Lembaga	39 Lembaga					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	
	<b>Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Tata Kelola Klinis Kesehatan Lanjutan</b>										
	IKK 16.3.3 Jumlah Rumah Sakit yang mampu tata laksana korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtPA)		180 RS	300 RS	420 RS	514 RS					Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan - Direktorat Pelayanan Klinis
	Output: 7957.QDB.005 <u>RS yang ditingkatkan kompetensi dalam layanan KtPA</u>	Pusat	50 RS	50 RS	50 RS	50 RS					
	IKK 16.3.4 Persentase Fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem rujukan online nasional		30%	50%	60%	80%					Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan - Direktorat Pelayanan Klinis
	Output: 7957.PFA.012 Pedoman Interoperabilitas sirsute	Pusat	1 NSPK	1 NSPK	1 NSPK	1 NSPK					
	Output: 7957.QDB.003 Pembinaan teknis Sistem Rujukan Terintegrasi pada Fasilitas pelayanan kesehatan	Pusat	100 lembaga	100 lembaga	100 lembaga	100 lembaga					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	
	Output: 7957.UAB.001 Pengembangan Sistem Rujukan Terintegrasi pada Fasilitas pelayanan Kesehatan	Pusat	1 sistem informasi	1 sistem informasi	1 sistem informasi	1 sistem informasi					
	IKK 16.4.3 Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan dan melaporkan audit medis		60%	70%	85%	100%					Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan - Direktorat Pelayanan Klinis
	Output: 7957.BDB.006 Implementasi Audit Klinis/medis pada 10 layanan prioritas	Pusat	399 RS	454 RS	508 RS	564 RS					
	IKK 16.4.6 Persentase RS yang memberikan layanan geriatri terpadu		25%	30%	40%	50%					Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan - Direktorat Pelayanan Klinis
	Output: 7957.QDB.004 <u>RS yang ditingkatkan kompetensi dalam layanan geriatri</u>	Pusat	50 Lembaga	50 Lembaga	50 Lembaga	50 Lembaga					
	IKK 16.5.1 Persentase provinsi dengan RS yang memenuhi kapasitas pelayanan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung,		60%	70%	80%	90%					Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan - Direktorat Pelayanan Klinis

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	
	stroke, ginjal sesuai standar										
	Output: 7957.QDB.006- <u>Layanan prioritas Kardiovaskuler di RS</u>	Pusat	320 RS	320 RS	320 RS	320 RS					
	Output: 7957.QDB.007- <u>Layanan prioritas Kanker di RS</u>	Pusat	321 Lembaga (RS)	321 Lembaga (RS)	321 Lembaga (RS)	321 Lembaga (RS)					
	Output: 7957.QDB.008- <u>Layanan prioritas Stroke di RS</u>	Pusat	314 Lembaga (RS)	314 Lembaga (RS)	314 Lembaga (RS)	314 Lembaga (RS)					
	IKK 16.5.2 Persentase kab/kota dengan RS yang memenuhi kapasitas pelayanan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, ginjal sesuai standar		45%	55%	70%	80%					Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan - Direktorat Pelayanan Klinis
	Output: 7957.QDB.011- <u>Layanan prioritas Uronefrologi di RS</u>	Pusat	318 Lembaga	318 Lembaga	318 Lembaga	318 Lembaga					
	Output: 7957.QDB.015- <u>Layanan prioritas KIA di RS</u>	Pusat	318 Lembaga	318 Lembaga	318 Lembaga	318 Lembaga					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	
	IKK 16.5.3 Persentase RS Pemerintah dengan kompetensi minimal strata Madya untuk pelayanan DM, TBC, PIE, Gastrohepato dan/atau Kesehatan Jiwa, sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan		60%	70%	80%	90%					Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan - Direktorat Pelayanan Klinis
	Output: 7957.QDB.009- <u>Layanan prioritas Respirasi dan TB di RS</u>	Pusat	120 Lembaga (RS)	160 Lembaga (RS)	200 Lembaga (RS)	268 Lembaga (RS)					
	Output: 7957.QDB.010- <u>Layanan prioritas DM di RS</u>	Pusat	177 Lembaga (RS)	177 Lembaga (RS)	177 Lembaga (RS)	177 Lembaga (RS)					
	Output: 7957.QDB.012- <u>Layanan prioritas PIE di RS</u>	Pusat	70 Lembaga (RS)	110 Lembaga (RS)	150 Lembaga (RS)	198 Lembaga (RS)					
	Output: 7957.QDB.013- <u>Layanan prioritas Kesehatan Jiwa di RS</u>	Pusat	150 Lembaga (RS)	190 Lembaga (RS)	230 Lembaga (RS)	263 Lembaga (RS)					
	Output: 7957.QDB.014- <u>Layanan prioritas Gastrohepatologi di RS</u>	Pusat	50 Lembaga (RS)	60 Lembaga (RS)	70 Lembaga (RS)	82 Lembaga (RS)					
	IKK 16.7.1 Jumlah RS yang memberikan pelayanan trauma center di Kab/kota		102 RS	205 RS	308 RS	448 RS					Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan -

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	
											Direktorat Pelayanan Klinis
	Output:7957.QDB.002 Fasilitasi pusat pelayanan trauma di Kab/Kota	Pusat	50 lembaga	50 lembaga	50 lembaga	50 lembaga					
	<b>Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Lanjutan</b>										
	IKK 16.4.1 Persentase RS yang mencapai target INM (Indikator Nasional Mutu)		16%	24%	32%	40%					Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan - Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan
	Output: 7957.AEF.201 Sosialisasi Budaya Mutu dan Keselamatan Pasien di Fasilitas Kesehatan	Pusat	21.000 Orang	21.000 Orang	21.000 Orang	21.000 Orang					
	Output: 7957.AEF.202 Sosialisasi terkait proses perizinandi Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pusat	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang					
	Output: 7957.AEG.201 Kampanye dan Advokasi Pengendalian	Pusat	10 Lembaga	10 Lembaga	10 Lembaga	10 Lembaga					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	
	Resistensi Antimikroba di Fasilitas pelayanan kesehatan, Asosiasi Pendidikan dan Masyarakat										
	Output: 7957.AFA.202 Pedoman Pengelolaan Pengaduan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pusat	2 Pedoman	2 Pedoman	2 Pedoman	2 Pedoman					
	Output: 7957.AFA.203 Penyusunan Pedoman Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lanjutan	Pusat	1 Pedoman	1 Pedoman	1 Pedoman	1 Pedoman					
	Output: 7957.AFA.204 Penyusunan Digitalisasi dan Automasi Proses Perizinan	Pusat	1 Pedoman	1 Pedoman	1 Pedoman	1 Pedoman					
	Output: 7957.BDB.201 Fasilitas pelayanan kesehatan Lainnya Menerapkan Budaya Mutu Keselamatan Pasien	Pusat	2.123 Lembaga	2.123 Lembaga	2.123 Lembaga	2.123 Lembaga					
	Output: 7957.BDB.202 Pertemuan Binwas dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Lanjutan dan Perizinan Kesehatan Rujukan	Pusat	52 Lembaga	52 Lembaga	52 Lembaga	52 Lembaga					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	
	Output: 7957.BDB.203 Peningkatan Keselamatan Pasien di Institusi pendidikan dalam Rangka Mendukung Rumah Sakit membangun Budaya keselamatan Pasien Menuju Zero Harm	Pusat	2 Lembaga	2 Lembaga	2 Lembaga	2 Lembaga					
	Output: 7957.BDB.204 Penerapan Survei Budaya keselamatan Pasien di Rumah sakit dan Unit Pelayanan Darah	Pusat	39 Lembaga	39 Lembaga	39 Lembaga	39 Lembaga					
	Output: 7957.BDB.205 Peningkatan Fasilitas Kesehatan melalui Evaluasi dan Pembinaan	Pusat	45 Lembaga	45 Lembaga	45 Lembaga	45 Lembaga					
	Output: 7957.BDB.206 Fasilitasi Pembinaan Perizinan FKTL	Pusat	120 Lembaga	120 Lembaga	120 Lembaga	120 Lembaga					
	Output: 7957.BKC.202 Pemantauan dan Evaluasi Mutu Pelayanan kesehatan	Pusat	29 Lembaga	29 Lembaga	29 Lembaga	29 Lembaga					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	
	di Rumah Sakit dan Unit Pengelola Darah										
	Output: 7957.BKC.203 Pelaksanaan Monitoring Perizinan di Fasilitas Pelayanan kesehatan	Pusat	15 Lembaga	15 Lembaga	15 Lembaga	15 Lembaga					
	Output: 7957.PBG.201 Peningkatan Kepatuhan terhadap standar Pelayanan kesehatan Rumah Sakit dan Unit Pengelola Darah Melalui Pelaporan Indikator Nasional Mutu dan Insiden Keselamatan Pasien	Pusat	3 Rekomend asi Kebijakan	3 Rekomend asi Kebijakan	3 Rekomend asi Kebijakan	3 Rekome ndasi Kebijaka n					
	Output: 7957.PDE.201 Rumah Sakit Pemerintah Terakreditasi Paripurna	Pusat	46 Lembaga	60 Lembaga	75 Lembaga	85 Lembaga					
	Output: 7957.PFA.201 Penyusunan NSPK Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dan Unit Pelayanan Darah	Pusat	2 NSPK	2 NSPK	2 NSPK	2 NSPK					
	IKK 16.4.2 Persentase Klinik Utama yang mencapai target		16%	24%	32%	40%					Direktorat Jenderal Kesehatan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Organisasi Pelaksana	
			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028		2029
	Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan yang ditentukan										Lanjutan - Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan
	Output: 7957.AFA.201 Pengembangan NSPK Mutu di Klinik Utama dan Lab Medis	Pusat	2 Pedoman	2 Pedoman	2 Pedoman	2 Pedoman					
	Output: 7957.BKC.002 Pemantauan Mutu laboratorium klinik dan Klinik utama	Pusat	16 Lembaga	24 Lembaga	32 Lembaga	40 Lembaga					
	<b>Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Rumah Sakit pemerintah yang melaporkan implementasi Program Pengendalian Resistansi Antimikroba (PPRA) kepada Kementerian Kesehatan melalui aplikasi sistem informasi Rumah Sakit</b>										
	IKK 16.6.1 Persentase Rumah Sakit yang mengimplementasikan Program Pengendalian		50%	60%	70%	80%					Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan - Direktorat

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Organisasi Pelaksana	
			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028		2029
	Resistensi Antimikroba (PPRA)										Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan
	Output: 7957.PEF.201 Sosialisasi dan Diseminasi kebijakan terkait Pengendalian Resistensi Antimikroba	Pusat	150 Orang	150 Orang	150 Orang	150 Orang					
	Output: 7957.PFA.202 NSPK Terkait AMR dan PPI	Pusat	2 NSPK	2 NSPK	2 NSPK	2 NSPK					
	Output: 7957.QDB.203 Implementasi Program Pengendalian Antimikroba di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Dinas Kesehatan Pengendalian Resistensi Antimikroba	Pusat	50 Lembaga	60 Lembaga	70 Lembaga	80 Lembaga					
	<b>Sasaran Kegiatan: Meningkatnya jumlah populasi yang berpartisipasi dalam penyimpanan dan pengambilan sampel Biobank</b>										
	IKK 31.1.1 Persentase populasi direkrut untuk penyimpanan biobank		97%	100%	100%	100%					Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan - Direktorat Pengembang

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	
											n Pelayanan Kesehatan Rujukan
	Output: 7957.AFA.102 NSPK Biobank dan/atau Biorepository	Pusat	1 NSPK	1 NSPK	1 NSPK	1 NSPK					
	Output: 7957. PEF.101 Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Pusat	9.600 Orang	9.600 Orang	9.600 Orang	9.600 Orang					
	Output: 7957.RAB.101 Reagen dan BHP Hubs BGSi	Daerah	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket					
	Output: 7957.RBV.101 Alat Non Medik BGSi	Daerah	36 Unit	36 Unit	36 Unit	36 Unit					
	Output: 7957.RCB.101 Operasional BGSi	Daerah	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket					
	Output: 7957.RCL.101 Pemeliharaan Jaringan BGSi	Daerah	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit					
	Output: 7957.UAB.102 – Pengembangan Sistem Biobank	Pusat	1 sistem informasi	1 sistem informasi	1 sistem informasi	1 sistem informasi					
	IKK 31.1.2 Persentase populasi yang menggunakan farmakogenomik		60%	80%	80%	80%					Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan - Direktorat Pengembang an Pelayanan Kesehatan Rujukan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	
	Output: 7957.PFA.101 - NSPK Pelayanan Kedokteran Presisi	Pusat	1 NSPK	1 NSPK	1 NSPK	1 NSPK					
	Output: 7957.QDB.103 - Fasilitasi RS Penyelenggara Kedokteran Presisi	Pusat	10 Lembaga	10 Lembaga	10 Lembaga	10 Lembaga					
	Output: 7957.AFA.105 - NSPK Penyelenggaraan Pengembangan Sel Punca dan Sel	Pusat	1 NSPK	1 NSPK	1 NSPK	1 NSPK					
	Output: 7957. BDB.103 - Fasilitasi RS Penyelenggara Pengembangan Sel Punca dan Sel	Pusat	8 Lembaga	8 Lembaga	8 Lembaga	8 Lembaga					
	Output: 7957. BDB.109 - Fasilitasi Lembaga Penyelenggaraan Peralihan dan Penggunaan Material,Muatan Informasi dan/atau Data	Pusat	10 Lembaga	10 Lembaga	10 Lembaga	10 Lembaga					
	Output: 7957. FAE.103 - Monitoring dan Evaluasi Teknologi Biomedis	Pusat	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan					
	Output: 7957. AFA.106 - NSPK Lab Sel Punca	Pusat	1 NSPK	1 NSPK	1 NSPK	1 NSPK					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	
	Output: 7957. AFA.107 - NSPK Bank Sel dan/atau Sel Punca	Pusat	1 NSPK	1 NSPK	1 NSPK	1 NSPK					
	Output: 7957. AFA.109 - NSPK Bank Mata	Pusat	1 NSPK	1 NSPK	1 NSPK	1 NSPK					
	Output: 7957. BDB.106 - Pembinaan Fasilitasi Pelayanan Lab dan bank sel punca	Pusat	10 Lembaga	10 Lembaga	10 Lembaga	10 Lembaga					
	Output: 7957. FAE.104 - Monitoring dan Evaluasi Fasilitas pelayanan kesehatan Penyelenggara Pelayanan Berbasis Terapi	Pusat	10 Lembaga	10 Lembaga	10 Lembaga	10 Lembaga					
	<b>Sasaran Kegiatan: Meningkatnya RS yang melakukan Penelitian Kesehatan</b>										
	IKK 32.2.1 Pertumbuhan RS yang sudah memiliki CRU sesuai Standar		63 RS	105 RS	193 RS	386 RS					Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan - Direktorat Pengembang an Pelayanan Kesehatan Rujukan
	Output: 7957. QDB.107- Pendampingan dan	Prov DKI Jakarta	3 RS	3 RS	3 RS	3 RS					



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	
	IKK 14.1.5 Jumlah UPT Vertikal yang ditingkatkan sarana, prasarana dan alkesnya		42 UPT	45 UPT	45 UPT	45 UPT					Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan - Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan
	Output: 7958.ABG.001 - Rekomendasi Kebijakan Pengembangan RS di Bidang Klinis [Rekomendasi Kebijakan]	Daerah	84 Rekomendasi Kebijakan	84 Rekomendasi Kebijakan	84 Rekomendasi Kebijakan	84 Rekomendasi Kebijakan					
	Output: 7958.BAH.001 - Pelayanan Publik Lainnya	Daerah	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan					
	Output: 7958.BEN.001 - Bantuan Pendidikan SDM Kesehatan	Daerah	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan					
	Output: 7958.RAB.008 Pemenuhan Peralatan Penunjang dan Peralatan Kesehatan RSUPT Riau	Pusat	1 Paket	1 Paket	-	-					
	Output: 7958.CAB.002-Alat Kesehatan (LR)	Daerah	1.710 Unit	1.795 Unit	1.884 Unit	1.978 Unit					
	Output: 7958.CAB.003-Obat-obatan dan BMHP (LR)	Daerah	249 Paket	261 Paket	274 Paket	288 Paket					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	
	Output: 7958.CAB.004 - Ambulans/Mobil Jenazah (LR)	Daerah	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit					
	Output: 7958.CAN.001 - Perangkat Pengolah Data dan Informasi (LR)	Daerah	1.331 Unit	1.331 Unit	1.331 Unit	1.331 Unit					
	Output: 7958.CAN.002 - Software/ antivirus UPT Vertikal (LR)	Daerah	96 Unit	96 Uni	96 Uni	96 Uni					
	Output: 7958.CAN.003 - Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (LR)	Daerah	2.027 Unit	2.027 Unit	2.027 Unit	2.027 Unit					
	Output: 7958.CBR.001 - Dukungan Teknis (LR- 12)	Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokume n					
	Output: 7958.CBT.001 - Data Center/Server (LR-12)	Daerah	12 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit					
	Output: 7958.CBV.001- Pembangunan Gedung Layanan (LR)	Daerah	10 Paket	29 Paket	30 Paket	30 Paket					
	Output: 7958.CBV.002- Renovasi Gedung Layanan (LR)	Daerah	2.177 Paket	2.285 Paket	2.400 Paket	2.520 Paket					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	
	Output: 7958.CBV.004 - Alat Non Medik - LR	Daerah	6.672 unit	7.005 unit	7.356 unit	7.723 unit					
	Output: 7958.CCB.001- Operasional dan Pemeliharaan UPT BLU	Daerah	35 Paket	38 Paket	38 Paket	38 Paket					
	Output: 7958.CCB.002- Operasional dan Pemeliharaan UPT Non BLU	Daerah	7 Paket	7 Paket	7 Paket	7 Paket					
	Output: 7958.CCL.001 - Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Komputer UPT BLU (LR-12)	Daerah	36 unit	18 unit	18 unit	18 unit					
	Output: 7958.DCM.002 - Pelatihan Bidang Kesehatan (LR)	Daerah	20.392 orang	21.412 orang	22.412 orang	23.606 orang					
	Output: 7958.EBA.962 - Layanan Umum	Daerah	42 Layanan	43 Layanan	43 Layanan	43 Layanan					
	Output: 7958.EBB.951 - Layanan Sarana Internal	Daerah	972 Unit	972 Unit	972 Unit	972 Unit					
	Output: 7958.EBB.971 - Layanan Prasarana Internal	Daerah	7 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit					
	Output:	Daerah	20.139 Orang	21.146 Orang	22.203 Orang	23.323 Orang					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	
	7958.EBC.001 - Layanan Kepegawaian Satker UPT Vertikal										
	Output: 7958.FAE.001 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan di UPT Vertikal (LR)	Daerah	23 Laporan	24 Laporan	25 Laporan	27 Laporan					
	Output: 7958.PBG.001 - Rekomendasi Kebijakan Pengembangan RS di Bidang Klinis Pelayanan KIA (IsDB) - LR	Daerah	6 Rekomend asi Kebijakan	-	-	-					
	Output: 7958.PBG.002 - Rekomendasi Kebijakan Pengembangan RS dalam meningkatkan sistem rujukan pelayanan KIA (IsDB) - LR	Daerah	6 Rekomend asi Kebijakan	-	-	-					
	Output: 7958.PBG.003 - Buku, Jurnal serta Inovasi (IsDB) Pelayanan KIA - LR	Daerah	6 Rekomend asi Kebijakan	-	-	-					
	Output: 7958.PBG.004 - Rekomendasi	Daerah	4 Rekomend	6 Rekomend	-	-					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	
	Kebijakan Pengembangan RS di Bidang Klinis Pelayanan Kanker Terpadu (IsDB) - LR		asi Kebijakan	asi Kebijakan							
	Output: 7958.PBG.005 - Rekomendasi Kebijakan Pengembangan RS dalam meningkatkan sistem rujukan Pelayanan Kanker Terpadu (IsDB) (LR-12)	Daerah	4 Rekomend asi Kebijakan	6 Rekomend asi Kebijakan	-	-					
	Output: 7958.PBG.006 Buku, Jurnal serta inovasi (IsDB) Pelayanan Kanker Terpadu		3 Rekomend asi Kebijakan	4 Rekomend asi Kebijakan	-	-					
	Output: 7958.QDB.001 - Fasilitasi Pengelolaan Manajemen Proyek Penguatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (IsDB)	Daerah	4 Lembaga	-	-	-					
	Output: 7958.QDB.002 - Fasilitasi Pengelolaan Manajemen Proyek Penguatan Pusat Pelayanan Kanker Terpadu (IsDB)	Daerah	5 Lembaga	6 Lembaga	-	-					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	
	Output: 7958.RAB.004-Alat Kesehatan Pelayanan Kanker Terpadu (IsDB)	Daerah	4 Paket	4 Paket	-	-					
	Output: 7958.RAB.401 - Pemenuhan Peralatan Onkologi RS UPT Surabaya (IsDB)	Pusat	1 Paket	-	-	-					
	Output: 7958.RAB.402 - Pemenuhan Peralatan Onkologi RS UPT Makassar (IsDB)	Pusat	1 Paket	-	-	-					
	Output: 7958.RAN.001 - Pengembangan sistem IT (smart hospital) Proyek Penataan Kawasan RS 3 Berlian	Daerah	1 Unit	1 Unit	-	-					
	Output: 7958.RBV.002 Gedung Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (IsDB)	Daerah	2 Unit	-	-	-					
	Output: 7958.RBV.003-Gedung Pelayanan Kesehatan Kanker Terpadu (IsDB)	Daerah	4 Paket	4 Paket	-	-					
	Output: 7958.RBV.004Alat Non Medis BGSi	Daerah	1 Unit	-	-	-					
	Output: 7958.RBV.005 Gedung Genebank Indonesia	Daerah	1 Unit	-	-	-					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Organisasi Pelaksana
			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	
	Output: 7958.RBV.401 Pembangunan dan Pengembangan RS UPT Riau	Daerah	1 RS	-	-	-				
	Output: 7958.RBV.402 Manajemen Konstruksi Gedung Genebank Indonesia	Daerah	1 Unit	-	-	-				
	Output: 7958.SCM.001 Pelatihan keterampilan dan kompetensi lainnya pada proyek penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak (IsDB)	Daerah	159 Orang	-	-	-				
	Output: 7958.SCM.002 Pelaksanaan Pendidikan formal tenaga RS pada proyek penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak (IsDB)	Daerah	47Orang	-	-	-				
	Output: 7958.SCM.003 Pelatihan Keterampilan dan Kompetensi Lainnya pada Proyek Penguatan Pelayanan Kanker Terpadu (IsDB) - LR	Daerah	243 Orang	243 Orang	-	-				

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	
	Output: 7958.SCM.004 Pelaksanaan Pendidikan Formal Tenaga RS pada Proyek Penguatan Pelayanan Kanker Terpadu (IsDB)	Daerah	109 Orang	109 Orang	-	-					
	Output: 7958.UAE.001 - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Pelaksanaan Proyek IsDB - LR	Daerah	1 Laporan	-	-	-					
	Output: 7958.UAE.002 - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Pelaksanaan Proyek IsDB Penguatan Pelayanan Pusat Kanker Terpadu - LR	Daerah	4 Laporan	4 Laporan	-	-					
	Output: 7968.QEA.001 Bantuan pelayanan klaim IPWL (LP-34)		4.350 Orang	4.350 Orang	4.350 Orang	4.350 Orang					
<b>024.WA Program Dukungan Manajeme n</b>							<b>4.2 48. 90 8</b>	<b>4.455.751</b>	<b>4.610.072</b>	<b>4.839.335</b>	
<b>4813. Kegiatan Dukungan Manajeme</b>							<b>4.2 48. 90 8</b>	<b>4.455.751</b>	<b>4.610.072</b>	<b>4.839.335</b>	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Organisasi Pelaksana	
			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028		2029
n Pelaksanaan Program di Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan											
	<b>Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya</b>										
	IKK 33.1.4 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan		78 (Nilai)	80 (Nilai)	82 (Nilai)	85 (Nilai)					Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan
	Output 4813.AAH.001. Peraturan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan	Pusat	10 peraturan	10 peraturan	10 peraturan	10 peraturan					
	Output 4813.EBA.956.Layanan BMN	Pusat	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan					
	Output 4813.EBA.957.Layanan Hukum	Pusat	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan					
	Output 4813.EBA.958.Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Pusat	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	
	Output 4813.EBA.962.Layanan Umum	Pusat	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan					
	Output 4813.EBA.994.Layanan Perkantoran	Pusat dan Daerah	26 layanan	26 layanan	26 layanan	26 layanan					
	Output 4813.QMA.001. Peningkatan Kualitas Data Rutin yang Dikumpulkan dan Dikelola di Lingkup Ditjen Keslan	Pusat	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen					
	IKK 33.2.4 Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan		92,55 (Nilai)	92,75 (Nilai)	92,95 (Nilai)	93,15 (Nilai)					Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan
	Output 4813.EBD.952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Pusat	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan					
	Output 4813.EBD.953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Pusat	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan					
	Output 4813.EBD.955 - Layanan Manajemen Keuangan	Pusat	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan					
	Output 4813.FAD.001 - Perencanaan dan Penganggaran UPT Vertikal	Pusat	4 layanan	4 layanan	4 layanan	4 layanan					
	Output: 4813.QDB.001 - Faslitasi Pengelolaan Proyek Penguatan RS	Pusat	1 lembaga	-	-	-					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	
	Rujukan Nasional dan UPT Vertikal (IsDB) (LR)										
	Output 4813.QDB.002.Fasilitas Pengelolaan Proyek Penguatan Pusat Layanan Kanker Terpadu UPT Vertikal (IsDB) (LR)	Pusat	1 lembaga	1 lembaga	-	-					
	Output 4813.QDB.003.Fasilitas Pengelolaan Proyek Penguatan RS Layanan KJSU (SIHREN)	Pusat	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	-					
	IKK 33.4.14 Nilai Maturitas Manajemen Risiko Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan		4 (Nilai)	4,05 (Nilai)	4,1 (Nilai)	4,15 (Nilai)					Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan
	Output: 4813.EBA.960. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan					
	IKK 33.3.4 Indeks Kualitas SDM Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan		82	83	84	85					Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan
	Output: 4813.EBC.954 Layanan Manajemen SDM	Pusat	2.945 Orang	2.945 Orang	2.945 Orang	2.945 Orang					
	IKK 33.4.22 Persentase Rekomendasi Hasil		95%	95%	95%	95%					Sekretariat Direktorat

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	
	Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan										Jenderal Kesehatan Lanjutan
	Output: 4813. EBA.960. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan					

**MATRIKS KERANGKA PENDANAAN**

**Tabel 1.** Kerangka Pendanaan Tahun 2025

<b>No.</b>	<b>Program</b>	<b>Kebutuhan Anggaran</b> (dalam juta rupiah)
		<b>2025</b>
1	Program Kesehatan Masyarakat	2.391.980
2	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	82.264.247
3	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	8.957.936
4	Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan	257.480
5	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	3.081.881
6	Program Dukungan Manajemen	8.695.866
<b>Total</b>		<b>105.649.390</b>

**Tabel 2.** Kerangka Pendanaan Tahun 2026 – 2029

<b>No.</b>	<b>Program</b>	<b>Kebutuhan Anggaran</b> (dalam juta rupiah)			
		<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
1	Program Pelayanan Kesehatan Primer	10.764.144	11.431.094	12.124.838	12.929.325
2	Program Pelayanan Kesehatan Lanjutan	33.100.157	30.165.688	31.442.964	32.779.772
3	Program Sistem Ketahanan Kesehatan	12.287.040	12.760.321	13.070.921	13.485.730
4	Program Sumber Daya Kesehatan	59.717.084	65.623.043	72.132.957	79.278.021
5	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	3.180.255	3.255.597	3.348.448	3.429.300
6	Program Dukungan Manajemen	10.523.450	10.996.937	11.301.654	12.349.491
<b>Total</b>		<b>129.572.130</b>	<b>134.232.680</b>	<b>143.421.782</b>	<b>154.251.639</b>

**MATRIKS PENDANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DAN SUMBER PENDANAAN LAINNYA YANG SAH TERHADAP KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS PROGRAM KESEHATAN LANJUTAN TAHUN 2025-2029**

PN/PP/KP/PRO-P/RO	Indikator Penugasan	Target Indikator					Satuan	Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
<b>PROGRAM KESEHATAN LANJUTAN</b>								<b>5.777.306</b>	<b>10.241.814</b>	<b>2.172.639</b>	<b>473.196</b>	<b>469.199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.777.306</b>	<b>10.241.814</b>	<b>2.172.639</b>	<b>473.196</b>	<b>469.199</b>
PN.02-Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru								203.761	2.019	2.069	2.109	2.159						203.761	2.019	2.069	2.109	2.159
PP.14-Ekonomi Digital								389	1.429	1.429	1.429	1.429						389	1.429	1.429	1.429	1.429
KP.02-Penguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Sektor Strategis Lainnya								389	1.429	1.429	1.429	1.429						389	1.429	1.429	1.429	1.429
Pro-P.08-Pelayanan Kesehatan Digital								389	1.429	1.429	1.429	1.429						389	1.429	1.429	1.429	1.429
DG.2090.QDB.101 - Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Pengembangan Pelayanan Telemedisin								389	0	0	0	0						389	0	0	0	0

PN/PP/KP/PRO-P/RO	Indikator Penugasan	Target Indikator						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)					
		2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	01-Jumlah Fasyankes yang memperoleh Bimbingan Teknis Pengembangan Pelayanan Telemedisin	100					Lembaga																
DY.7957.QDB.101	-Bimbingan Teknis Pengembangan Pelayanan Telemedisin								1.429	1.429	1.429	1.429						0	1.429	1.429	1.429	1.429	1.429
	Jumlah Fasyankes yang memperoleh Bimbingan Teknis Pengembangan Pelayanan Telemedisin		60	60	60	60	Lembaga																
PP.16-Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Ekosistem, Spesies dan Generik								203.372	590	640	680	730						203.372	590	640	680	730	
KP.05-Peningkatan Bioprospeksi, Bioteknologi, Keamanan Hayati, serta Akses dan Pembagian Keuntungan Sumber Daya Genetik								203.372	590	640	680	730						203.372	590	640	680	730	
PRO-P.01-Pengembangan Bioprospeksi, Bioteknologi, serta Akses dan Pembagian Keuntungan Sumber Daya								203.372	590	640	680	730						203.372	590	640	680	730	

PN/PP/KP/PRO-P/RO	Indikator Penugasan	Target Indikator						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)					
		2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Genetik																							
2051.RBV.002 Pembangunan dan Pengembangan Gedung GeneBank Indonesia								202.456										202.456	0	0	0	0	0
	01- Terbangunnya Gedung Genebank Indonesia	1					Unit												0	0	0	0	0
DG.2090.QDB.003 Fasyankes yang mengimplementasikan Sistem Rujukan Terintegrasi								550										550	0	0	0	0	0
	Jumlah Fasyankes yang ditetapkan sebagai pelaksana Sistem Rujukan Terintegrasi	100					Lembaga											185	0	0	0	0	0
DY.7957.QDB.003 Pembinaan Teknis Sistem Rujukan Terintegrasi pada Fasyankes									210	230	250	280						0	210	230	250	280	
	Jumlah Fasyankes yang diberi pembinaan teknis Sistem Rujukan Terintegrasi		100	100	100	100	lembaga											0	210	230	250	280	
DG.2090.UAB.001 Pengembangan Sistem Rujukan Terintegrasi pada Fasilitas Pelayanan								366										366	0	0	0	0	0





PN/PP/KP/PRO-P/RO	Indikator Penugasan	Target Indikator						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)					
		2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	04.11.01.01.12 - Angka kematian neonatal	9	8	8	8	7	per 1.000 kelahiran hidup																
	04.11.01.01.13 - Angka Kematian Bayi	13	12	11	10	10	per 1.000 kelahiran hidup																
	04.11.01.01.14 - Cakupan Kunjungan Neonatal (KN) lengkap sesuai standar	91	92	93	94	95	%																
	04.11.01.01.15 - Cakupan imunisasi bayi lengkap	80	85	90	93	95	%																
PRO-P.01- Penguatan Kapasitas Pelayanan Kegawatdaruratan Ibu & Anak								177.136	1.366	1.416	1.467	1.518						177.136	1.366	1.416	1.467	1.518	
DG.2090.QDB.001 -Pembinaan RS PONEK serta Operasi Sectio Caesarea Darurat dalam Waktu Kurang Atau Sama Dengan 30 Menit								337										337	0	0	0	0	
	Jumlah RS PONEK yang dibina	570					RS																
DY.7957.QDB.001 -Pembinaan RS PONEK serta Operasi Sectio Caesarea Darurat dalam Waktu Kurang Atau Sama Dengan 30 Menit									370	410	460	510						0	370	410	460	510	





PN/PP/KP/PRO-P/RO	Indikator Penugasan	Target Indikator						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)					
		2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	04.11.03.03.01 - Persentase lansia yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	50	55	60	65	70	Persen																
	04.11.03.03.02 - Persentase puskesmas santun lansia	70	75	80	85	90	Persen																
	04.11.03.03.03 - Persentase RS yang memberikan layanan geriatri terpadu	20	25	30	40	50	Persen																
	04.11.03.03.04 - Persentase lanjut usia dengan ketergantungan sedang, berat, dan total mendapatkan perawatan jangka Panjang (PJP)	10	20	30	40	50	Persen																
	04.11.03.04.04 - Persentase Puskesmas mampu Pelayanan KB MKJP	30	35	40	45	50	Persen																
PRO-P.03-Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi lansia								95	250	320	350	390						95	250	320	350	390	
DG.2090.QDB.004 - RS yang diberikan pembinaan dalam pelayanan geriatri sesuai standar								95										95	0	0	0	0	0



PN/PP/KP/PRO-P/RO	Indikator Penugasan	Target Indikator						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)					
		2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	04.13.04.01.03 - Persentase perempuan dengan DNA HPV positif yang dilakukan tindak lanjut dengan IVA/Kolposkopi/PAPs sesuai protokol	30	50	65	80	90	Persen																
	04.13.04.01.04 - Persentase perempuan dengan lesi pra kanker leher rahim yang mendapatkan pengobatan sesuai dengan protokol	20	40	50	60	70	Persen																
	04.13.04.01.05 - Cakupan imunisasi HPV	90	90	90	90	90	Persen																
	04.13.04.02.01 - Cakupan Skrining Kesehatan Jiwa	10	15	20	25	30	Persen																
PRO-P.03-Peningkatan upaya kesehatan jiwa								360	390	430	470	510						360	390	430	470	510	
2090.QDB.013-RS yang ditingkatkan kompetensi dalam layanan kesehatan jiwa								360										360	0	0	0	0	
	Jumlah Provinsi yang dibina dalam penguatan pelayanan kesehatan jiwa	100					RS																
DY.7957.QDB.013 -Layanan prioritas Kesehatan Jiwa di RS									390	430	470	510						0	390	430	470	510	





PN/PP/KP/PRO-P/RO	Indikator Penugasan	Target Indikator						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)					
		2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
KP.02-Pemenuhan sediaan farmasi dan pengendalian resistensi antimikroba								840	1.327	1.460	1.607	1.783						840	1.327	1.460	1.607	1.783	
	04.14.02.01.01 - Persentase kab/kota dengan pemenuhan obat dan vaksin tepat waktu dan tepat jumlah	65	70	76	83	90	%																
	04.14.02.01.02 - Persentase penurunan kekosongan (stock out) obat dan vaksin di fasyankes	10	15	20	25	30	%																
	04.14.02.01.03 - Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	91	92	94	96	98	%																
	04.14.02.01.04 - Persentase RS yang mengimplementasikan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA)	30	50	60	70	80	%																
	04.14.02.01.05 - Persentase FKTP yang mengimplementasikan penggunaan antibiotik rasional	30	50	60	70	80	%																
PRO-P.03-Pengendalian Resistensi								840	1.327	1.460	1.607	1.783						840	1.327	1.460	1.607	1.783	

PN/PP/KP/PRO-P/RO	Indikator Penugasan	Target Indikator						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)					
		2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Antimikroba																							
5836.QDB.003 Pembinaan Fasilitas pelayanan kesehatan dalam mengimplementasikan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba								838										838	0	0	0	0	0
	Jumlah pelatihan untuk Peningkatan Mutu SDM Dinas Kesehatan	30					lembaga																
DY. 7957.QDB.203 Pembinaan Fasilitas pelayanan kesehatan dalam mengimplementasikan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba									1.326	1.459	1.605	1.781					0	1.326	1.459	1.605	1.781		
	Jumlah Fasilitas Implementasi Program Pengendalian Antimikroba di Fasyankes dan Dinas Kesehatan	50	60	70	80		lembaga																
DG.5836.QDB.010 - Penyelenggaraan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba di Fasilitas Pelayanan Kesehatan								2									2	0	0	0	0	0	0





PN/PP/KP/PRO-P/RO	Indikator Penugasan	Target Indikator						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)					
		2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	04.15.02.01.06 - Persentase RS Pemerintah Daerah yang memenuhi Ketersediaan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standar	45	60	70	75	80	%																
	04.15.02.01.07 - Kab/Kota dengan RSUD tipe D yang ditingkatkan menjadi tipe C	22	32	49	66	66	Kab/Kota																
	04.15.02.01.08 - Jumlah RS Pemerintah yang memenuhi tingkat maturitas kemandirian	5	10	20	25	30	RS																
PRO-P.01- Peningkatan Kualitas Pelayanan Rujukan								2.053.901	7.056.755	2.160.195	460.195	455.343						2.053.901	7.056.755	2.160.195	460.195	455.343	
DG.2051.UAE.006 Alkes PDN yang dilakukan Monitoring dan Evaluasi								469										469	0	0	0	0	0
	Jumlah RS yang dilakukan monitoring dan evaluasi terkait Alkes PDN	37					Rekomendasi																
DG. 2051.UAE.012 Pemantauan dan Evaluasi RS kelas D/D Pratama yg ditingkatkan kualitasnya								1.815										1.815	0	0	0	0	0



PN/PP/KP/PRO-P/RO	Indikator Penugasan	Target Indikator						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Output: 6807.QDB.008- BLU RS Pemerintah yang ditingkatkan kemandiriannya								1.500									1.500	0	0	0	0	
	Jumlah BLU RS Pemerintah yang ditingkatkan kemandiriannya	50					lembaga															
DY. 7957.QDB.308- BLU RS Pemerintah yang ditingkatkan kemandiriannya									1.575	1.575	1.575	1.575					0	1.575	1.575	1.575	1.575	
	Jumlah BLU RS Pemerintah yang ditingkatkan kemandiriannya		50	50	50	50	lembaga															
DG.2051.RBV.001 Pembangunan dan Pengembangan RS UPT Vertikal Riau								346.074									346.074	0	0	0	0	
	Bertambahnya jumlah TT di Kab/Kota di rumah sakit di Provinsi Riau	1					RS															
7958.RBV.401 Pembangunan dan Pengembangan RS UPT Vertikal Riau									362.560								0	362.560	0	0	0	
	01-Jumlah RS Vertikal yang dibangun di Provinsi Riau		1				RS															
DG.2051.QDB.009 Fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta yang dilakukan pembinaan teknis								366	0	0	0	0					366	0	0	0	0	

PN/PP/KP/PRO-P/RO	Indikator Penugasan	Target Indikator						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)					
		2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
ASPAK																							
	Jumlah Fasyankes Pemerintah maupun Swasta yang dilakukan pembinaan teknis ASPAK	32					Lembaga																
DG. 2051.QEG.001 RS Berkualitas di Kab/Kota (Pemenuhan PHTC bidang kesehatan)								1.703.677										1.703.677	0	0	0	0	0
	Jumlah RS yang ditingkatkan kelasnya	22 paket					paket																
DY.7957.QEO.401 - Pembangunan Peningkatan RS Berkualitas di Kab/Kota (Pemenuhan PHTC Bidang Kesehatan)								0	6.234.000	1.700.000							0	6.234.000	1.700.000	0	0	0	0
	01- Terlaksananya Pembangunan Peningkatan RS Berkualitas di Kab/Kota (Pemenuhan PHTC Bidang Kesehatan)		34	49	66	66	Paket																
PRO-P.02- Pengembangan Layanan Unggulan Berbasis Kompetensi								3.321.857	3.176.754	3.726	3.835	4.188					3.321.857	3.176.754	3.726	3.835	4.188		
DG.2051.UAE.011 - Monitoring Pemanfaatan								1.033	0	0	0	0					1.033	0	0	0	0	0	0





PN/PP/KP/PRO-P/RO	Indikator Penugasan	Target Indikator						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)					
		2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Jumlah RS yang dilakukan pembinaan pada layanan prioritas kardiovaskuler		320	320	320	320	RS																
DG.2090.QDB.007	-RS yang ditingkatkan kompetensi dalam layanan kanker							270										270	0	0	0	0	0
	Jumlah RS yang ditingkatkan kompetensi dalam layanan kanker	321					RS																
DY.7957.QDB.007	-Layanan prioritas Kanker di RS								310	350	490	530					0	310	350	490	530		
	Jumlah RS yang dilakukan pembinaan dalam layanan prioritas Kanker		321	321	321	321	RS																
DG.2090.QDB.008	-RS yang ditingkatkan kompetensi dalam layanan stroke							291									291	0	0	0	0	0	0
	Jumlah RS yang ditingkatkan kompetensi dalam layanan stroke	314					RS																
7957.QDB.008-	Layanan prioritas Stroke di RS								330	370	520	550					0	330	370	520	550		
	Jumlah RS yang dilakukan pembinaan dalam layanan prioritas Stroke		314	314	314	314	RS																
DG.2090.QDB.011	-RS yang ditingkatkan kompetensi dalam							297									297	0	0	0	0	0	0

PN/PP/KP/PRO-P/RO	Indikator Penugasan	Target Indikator						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)					
		2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
layanan uronefrologi																							
	Jumlah RS yang ditingkatkan kompetensi dalam layanan uronefrologi	318					RS																
DY.7957.QDB.011 -Layanan prioritas Uronefrologi di RS									335	373	525	570						0	335	373	525	570	
	Jumlah RS yang dilakukan pembinaan dalam layanan prioritas uronefrologi		318	318	318	318	RS																
DG.2090.QDB.010 -RS yang ditingkatkan kompetensi dalam layanan diabetes mellitus								507										507	0	0	0	0	0
	Jumlah RS yang ditingkatkan kompetensi dalam layanan diabetes melitus	177					RS																
DY.7957.QDB.010 -Layanan prioritas DM di RS									550	600	650	700						0	550	600	650	700	
	Jumlah RS yang dilakukan pembinaan dalam layanan prioritas DM		177	177	177	177	RS																
DG.2090.QDB.015 -RS yang ditingkatkan kompetensi dalam layanan kesehatan ibu dan anak								224										224	0	0	0	0	0

PN/PP/KP/PRO-P/RO	Indikator Penugasan	Target Indikator						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)					
		2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Jumlah RS yang ditingkatkan kompetensi dalam layanan kesehatan Ibu dan Anak	318					RS																
7957.QDB.015-Layanan prioritas KIA di RS									306.950									0	306.950	0	0	0	0
	Jumlah RS yang dilakukan pembinaan dalam layanan prioritas KIA		318	318	318	318	lembaga																
DG.6388.RBV.003 -Gedung Pelayanan Kesehatan Kanker Terpadu (IsDB) - LR								573										573	0	0	0	0	0
	01-Jumlah pembangunan gedung pelayanan kanker terpadu UPT Vertikal	4					Paket																
DY.7958.RBV.003 -Gedung Pelayanan Kesehatan Kanker Terpadu (IsDB) - LR									286	246	0							0	286	246	0	0	0
	01-Jumlah pembangunan gedung pelayanan kanker terpadu UPT Vertikal		5	4			Paket																
DG.6388.RAB.004 - Alat Kesehatan Pelayanan Kanker Terpadu (IsDB) (LR-12)								98	0	0	0	0						98	0	0	0	0	0

PN/PP/KP/PRO-P/RO	Indikator Penugasan	Target Indikator						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)					
		2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	01-Jumlah pengadaan alat kesehatan pelayanan kanker terpadu	4					Paket																
7958.RAB.004-Alat Kesehatan Pelayanan Kanker Terpadu (IsDB) (LR-12)								722	294	0	0						0	722	294	0	0		
	01-Jumlah pengadaan alat kesehatan pelayanan kanker terpadu		4	4			Paket																
PRO-P.03-Penguatan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan di Daerah Sulit Akses								59	59	59	59	59					59	59	59	59	59	59	59
DG.2051.QEG.002 - Bantuan Operasional RS Kapal (Pemenuhan PHTC bidang Kesehatan)								59									59	0	0	0	0	0	0
	01-Jumlah Bantuan Operasional RS Kapal (Pemenuhan PHTC bidang Kesehatan)		10				Paket																
DY.7957.QEO.402 - Bantuan Operasional RS Kapal (Pemenuhan PHTC Bidang Kesehatan)								0	59	59	59	59					0	59	59	59	59	59	59



PN/PP/KP/PRO-P/RO	Indikator Penugasan	Target Indikator						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)					
		2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	anak																						
PRO-P.03-Peningkatan Kualitas Pendanaan kesehatan								350	350	350	350	350						350	350	350	350	350	
DG.2090.BDB.005-Rumah sakit yang diberikan pembinaan pembiayaan kesehatan dan jaminan kesehatan								350										350	0	0	0	0	
	01-Jumlah Rumah sakit yang diberikan pembinaan pembiayaan kesehatan dan jaminan kesehatan	36					lembaga																
DY.7957.BDB.326-Pembinaan teknis pembiayaan JKN pada RS									350	350	350	350						0	350	350	350	350	
	01-Jumlah Pembinaan teknis pembiayaan JKN pada RS		36	36	36	36	lembaga																
KP.05-Penguatan tata kelola, data, informasi dan inovasi teknologi kesehatan								18.489	2.089	2.168	2.254	2.349						18.489	2.089	2.168	2.254	2.349	



PN/PP/KP/PRO-P/RO	Indikator Penugasan	Target Indikator						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
PRO-P.01-Penguatan Tata Kelola Kesehatan								15.912	787	866	952	1.047						15.912	787	866	952	1.047
DG.2051.QDB.013 - Pembinaan teknis pemenuhan dan pengembangan sarana prasarana dan alat kesehatan UTD								645	0	0	0	0						645	0	0	0	0
	01-Jumlah UTD yang diberikan pembinaan	32					Lembaga															
DY.7957.QDB.413 Pembinaan teknis pemenuhan dan pengembangan sarana prasarana dan alat kesehatan UTD									787	866	952	1.047						0	787	866	952	1.047
	12-Terlaksananya Pembinaan teknis pemenuhan dan pengembangan sarana prasarana dan alat kesehatan UPD		80	88	97	107	Lembaga/UTD															
DG.2051.UAE.004 - Sarana Prasarana Alat UPD yang dilakukan monitoring dan evaluasi								736	0	0	0	0						736	0	0	0	0
	01-Jumlah UTD yang dilakukan monitoring dan evaluasi	37	0	0	0	0	Laporan															
DG.6388.RCB.001 - Operasional BGSi								14.531	0	0	0	0						14.531	0	0	0	0



PN/PP/KP/PRO-P/RO	Indikator Penugasan	Target Indikator						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)					
		2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Keslan																							
	01-Jumlah kualitas data rutin yang dikumpulkan dan dikelola di lingkup unit kerja yang tugas dan fungsinya di bidang pelayanan kesehatan		3	3	3	3	Dokumen																
DG.2087.UBA.002 - Pembinaan Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik di Klinik serta Praktik Mandiri Tenaga Medis/ Tenaga Kesehatan								274	0	0	0	0						274	0	0	0	0	0
	Jumlah provinsi yang mendapat pembinaan penyelenggaraan rekam medis elektronik di klinik serta praktik mandiri tenaga medis/tenaga kesehatan	1					Daerah (Prov/Kab/Kota)																
PRO-P.03-Peningkatan Pemanfaatan dan Inovasi Teknologi Kesehatan								871	901	901	901	901						871	901	901	901	901	901
DG.2051.PEF.003 Sosialisasi dan diseminasi bidang alkes RS yang ditetapkan sebagai								212										212	0	0	0	0	0

PN/PP/KP/PRO-P/RO	Indikator Penugasan	Target Indikator						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)					
		2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
jejaring penyakit prioritas nasional																							
	Jumlah orang yang tersosialisasi dan diseminasi bidang alkes RS yang ditetapkan sebagai jejaring penyakit prioritas nasional	250					Orang																
4813DG.6807.QD B.002-RS menerapkan rekam medis elektronik								437										437	0	0	0	0	0
	Jumlah RS menerapkan rekam medis elektronik	481					lembaga																
DG.2090.PFA.012 Pedoman Interoperabilitas Sisrute								100															
	Jumlah Pedoman Sisrute	1					NSPK																
DG.2090.QDB.103 - Pendampingan Teknis dan Supervisi RS Penyelenggara Kedokteran Presisi								114										114	0	0	0	0	0
	Jumlah RS yang memperoleh pendampingan penyelenggaraan pelayanan kedokteran presisi	10					lembaga																
DY.7957.QDB.103 - Pendampingan Teknis dan									445	445	445	445						0	445	445	445	445	445

PN/PP/KP/PRO-P/RO	Indikator Penugasan	Target Indikator						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)					
		2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Supervisi RS Penyelenggara Kedokteran Presisi																							
	Jumlah RS yang memperoleh pendampingan penyelenggaraan pelayanan kedokteran presisi		10	10	10	10	lembaga																
DG.2090.AEF.101 - Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan								8										8	0	0	0	0	0
	Jumlah peserta Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan	19.200					orang																
DY.7957.AEF.101 - Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan									6	6	6	6					0	6	6	6	6	6	
	Jumlah peserta Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan		9.600	9.600	9.600	9.600	orang																
DY.7957.QDB.302 - Pembinaan Teknis Penerapan Rekam Medis Elektronik pada RS									450	450	450	450					0	450	450	450	450	450	

PN/PP/KP/PRO-P/RO	Indikator Penugasan	Target Indikator						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)					
		2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	01 - Jumlah Pembinaan Teknis Penerapan Rekam Medis Elektronik pada RS		481	481	481	481	lembaga																
PP.19- Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan dari Kekerasan								337	370	410	460	510						337	370	410	460	510	
KP.01- Peningkatan Akses Layanan Kesehatan dan Pendidikan								337	370	410	460	510						337	370	410	460	510	
Pro-P. 01- Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Reproduksi								337	370	410	460	510						337	370	410	460	510	
DG.2090.QDB.001 -Pembinaan RS PONEK serta Operasi Sectio Caesarea Darurat dalam Waktu Kurang Atau Sama Dengan 30 Menit								337										337	0	0	0	0	
	01-Jumlah RS PONEK yang dibina	570					RS																
DY.7957.QDB.001 -Pembinaan RS PONEK serta Operasi Sectio Caesarea Darurat dalam Waktu Kurang Atau									370	410	460	510						0	370	410	460	510	

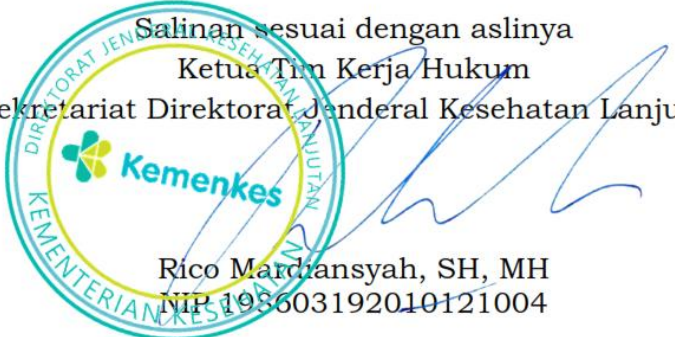
PN/PP/KP/PRO-P/RO	Indikator Penugasan	Target Indikator						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)					
		2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Sama Dengan 30 Menit																							
	01-Jumlah RS PONEK yang dibina serta Operasi Sectio Caesarea Darurat dalam Waktu Kurang Atau Sama Dengan 30 Menit		620	670	720	770	Lembaga																

DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN,

ttd.

AZHAR JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Ketua Tim Kerja Hukum  
 Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan



Rico Marchansyah, SH, MH  
 NIP.198603192010121004